

SEJARAH SOSIAL BALI KOTA SINGARAJA

Tim Penyusun :

- 1. Drs. A.A. Gde Putra Agung**
- 2. Drs. F.X. Soenaryo**
- 3. Drs. Ida Bagus Sidemen**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

JAKARTA

1984

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SOSIAL BALI KOTA SINGARAJA

Tim Penyusun

1. Drs. A.A Gde Putra Agung
2. Drs. FX. Soenaryo
3. Drs. Ida Bagus Sidemen

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1984**

M. K. Dewik
T. van der Veld

LIJST VAN BOEKEN ALPHABETISCH

1. De geschiedenis van de
2. De geschiedenis van de
3. De geschiedenis van de

1. De geschiedenis van de
2. De geschiedenis van de
3. De geschiedenis van de

Penyunting :

Abdurachman Surjomihardjo

R Z. Leirissa, MA.

M. Soenjata Kartadarmadja

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang di-

perluan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penerbitan ini.

Jakarta, Januari 1984
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial yang dimaksud ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena adanya proses sosialisasi yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia maka diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi

pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, pemenuhan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Januari 1984

Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Ruang Lingkup dan Permasalahan	1
1.2 Metode Penulisan	2
1.3 Tinjauan Sumber	2
Bab II Singaraja Pada Masa Kolonial Belanda	5
2.1 Keadaan Geografis	5
2.2 Pertumbuhan Penduduk	7
2.3 Sistem Sosial	8
2.3.1 Stratifikasi Sosial	8
2.3.2 Interaksi Sosial	11
2.4 Kehidupan Ekonomi	13
2.4.1 Mata Pencarian	13
2.4.2 Lalu Lintas Darat	15
2.4.3 Perdagangan Laut	16
2.5 Struktur Pemerintahan	20
2.6 Pendidikan	24

2.7	Organisasi Sosial	26
2.7.1	Perkumpulan Suita Gama Tirta	26
2.7.2	Perkumpulan Shanti	27
2.7.3	Perkumpulan Surya	29
2.7.4	Partai Indonesia Raya	30
Bab III	Singaraja Pada Masa Penjajahan Jepang	35
3.1	Sistem Pemerintahan	35
3.2	Kehidupan Sosial Ekonomi	38
3.3	Pendidikan	41
3.4	Organisasi Sosial	41
Bab IV	Singaraja Sesudah Kemerdekaan	45
4.1	Sistem Pemerintahan	45
4.2	Kehidupan Ekonomi	46
4.3	Mobilitas Sosial	48
4.4	Interaksi Sosial	49
4.5	Pendidikan	51
4.6	Kegiatan Budaya	53
Bab V	Kesimpulan	56
	LAMPIRAN	58
	DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1 *Ruang Lingkup Permasalahan*

Penulisan Sejarah Sosial Daerah Bali, mengambil batasan waktu antara tahun 1900 – 1950 dan memilih daerah penelitian di Bali Utara khususnya Kota Singaraja. Pemilihan Kota Singaraja sebagai daerah penelitian, ada beberapa alasan antara lain :

- 1) Pada periode tahun 1900 – 1950 itu Kota Singaraja mempunyai kedudukan penting, yaitu sebagai Ibu Kota Keresidenan Bali dan Lombok dan pada tahun 1945 sampai tahun 1950 berstatus sebagai Ibu Kota Propinsi Sunda Kecil yang pada saat sekarang ini meliputi Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Di samping sebagai kota pusat pemerintahan, Kota Singaraja dapat digolongkan pula sebagai kota pelabuhan yaitu Pelabuhan Buleleng; dan
- 3) Sebagai pusat pemerintah dan sebagai kota pelabuhan, pada perkembangan selanjutnya Kota Singaraja jelas menampakkan dirinya sebagai kota yang paling maju dibandingkan kota-kota lainnya di Bali, tempat dibukanya sekolah-sekolah yang pertama di Bali, tempat tumbuhnya organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan agama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas pemilihan Kota Singaraja sebagai daerah penelitian sangat relevan dengan penulisan sejarah sosial.

1.2 *Metoda Penulisan*

Seperti lazimnya dalam penulisan sejarah, prosedur kerja pertama-tama adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian arsip, baik arsip-arsip yang dikirim oleh tim dari pusat berupa *Memorie van Overgave* dan beberapa arsip yang kami temukan di beberapa tempat di Bali. Di samping itu, kami memperoleh data dari penelitian perpustakaan dan hasil wawancara. Tahap kedua adalah kalsifikasi data dan pengolahan data dan tahap berikutnya adalah penulisan.

Pada tahap penulisan ini, sesuai pula dengan metode penulisan sejarah sosial,¹ sudah tentu harus banyak dibekali konsep, teori, yang banyak dibantu oleh disiplin ilmu lain yang terga- bung dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, politik dan antropologi. Dengan menerapkan metoda sejarah seperti tersebut di atas, kita mudah untuk melihat permasalahan, sehingga diharapkan penulisan Sejarah Sosial Daerah Bali ini dapat memberikan hasil yang memuaskan.

1.3 *Tinjauan Sumber*

Beberapa sumber penting yang perlu dikemukakan di sini adalah berupa *Memorie van Overgave* yaitu : (1) G.T. de Bruijn Kps, *Nota van Overgave van het Bestuur over de Residentie bali en Lombok*, 1909; (2) H.W. Veenhuyzen, *Memorie van Overgave der Resdentie Bali en Lombok*, November 1914; (3) L.U. van Stenis, *Memorie van Overgave van het fewest Bali en Lombok*, April 1919; (4) P.E. Moolenburgh, *Memorie van Overgave van het fewest Bali en Lombok*, September 1926; (5) L.J.J. Caron, *Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok*, Augustus 1929; (6) Beeuwkes, *Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok*, October

1932; dan (7) H.J.E. Mool, *Memorie van Overgave van den aftrede van Resident Bali en Lombok*, Mei 1941.

Seperti lazimnya, isi dari sebuah laporan serah terima jabatan adalah merupakan sebuah laporan yang sifatnya sangat umum, di dalamnya termuat mengenai keadaan grafis, kependudukan, pemerintahan, agraria, kesehatan, pendidikan dan agama.

Salah satu sumber yang khusus menguraikan keadaan di Buleleng (Bali Utara) adalah *Nota van toelichtingen* yaitu laporan yang dibuat oleh C.J. Grader, seorang *controleur* yang bertugas di Singaraja sekitar tahun 1937. Walaupun semua laporan tersebut di atas tidak dapat terlepas dari pengaruh pandangan Eropa-centris, namun patut kita hargai dari segi kecermatan dan ketrampilannya dalam menyusun laporan tersebut sehingga banyak data yang diperoleh dari laporan itu.

Sumber-sumber yang sezaman (kontemporer) berupa beberapa majalah antara lain majalah *Bali Adnjana*, yang terbit antara tahun 1924–1929 dan majalah *Surya Kanta* terbit antara tahun 1925–1927. Kedua majalah tersebut diterbitkan di Singaraja. Salah satu majalah mengenai kebudayaan adalah majalah *Bhawanagara* juga terbit di Singaraja atas usaha sebuah yayasan yang bernama *Lieferinck van der Tuuk*, kini dikenal dengan nama Gedong Kirtya.

Salah satu sumber yang perlu disebutkan di sini adalah *Monografi Pulau Bali* yang disusun oleh I Gusti Gde Raka (1955), banyak memberikan informasi mengenai keadaan di Bali sekitar tahun 1950.

Beberapa kesukaran dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah di Bali terutama sumber-sumber pada masa pemerintahan Jepang, boleh dikatakan sangat sedikit. Ada beberapa alasan yang menyebabkan sulit mendapatkan sumber antara lain karena kantor-kantor pemerintahan di Singaraja sering pindah, sehingga sulit untuk menemukan kembali arsip-arsip yang diperlukan.

CATATAN BAB I

1. Pengertian Sejarah Sosial, lihat Kuntowijoyo, *Beberapa Model Penulisan Sejarah Sosial*. (brosur). Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984. Lihat juga E.J. Hobsbawm, "From Social History to the History of Society." *Deadalus : Historical studies Today*. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Winter 1971, hal. 20-45.

BAB II SINGARAJA PADA MASA KOLONIAL BELANDA

2.1 *Keadaan Geografis*

Pulau Bali terletak di antara $7^{\circ}54'$ dan $8^{\circ}53'30''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}26'$ dan $115^{\circ}43'$ Bujur Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut : di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali, di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali. Singaraja merupakan salah satu kota dari delapan kota kabupaten di seluruh Bali, yaitu sebagai Kota Kabupaten Buleleng. Dilihat dari luas darahnya, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang paling luas dibandingkan kabupaten lainnya di Bali, sehingga pada masa kolonial Belanda Kabupaten Buleleng disebut Bali Utara, sedangkan tujuh kabupaten lainnya dimasukkan pada bagian Bali Selatan.

Keadaan iklimnya hampir sama dengan keadaan iklim di Indonesia yaitu beriklim tropik. Keadaan fisik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu daerah dataran tinggi yaitu daerah pegunungan dan dataran rendah berada di sepanjang pantai utara. Hal ini sangat mempengaruhi letak Kota Singaraja yang miring dan jaringan jalannya yang naikturun. Di daerah pegunungan terletak desa-desa yang masih memiliki corak "kekuanoan" seperti Desa Sidetapa, Desa Tigawasa, dan Desa Cempaga.

Sedangkan di daerah dataran rendah umumnya masyarakat hidup dari pertanian dan nelayan.

Kota Singaraja yang termasuk di dalam Distrik (kecamatan) Buleleng berada di bawah pengawasan "perbekel" (camat) kota, dan membawahi beberapa perbekelan (desa) dengan desa adatnya yaitu :

Perbekelan	Desa Adat
1. Kalibukbuk	Kalibukbuk
2. Anturan	Banyualit
3. Tukadmungga	Anturan
4. Pamaron	Tukadmungga
5. Galiran	Pamaron
6. Buleleng	Galiran, Tista dan Bangkang
7. Bratan	Buleleng
8. Runuh	Banyumala
9. Nagasepaa	Bratan
10. Petandakan	Runuh
11. Padangkling	Ragasepaa
12. Banyuring	Petandakan
13. Panarukan	Padangkling
14. Jinengdalem	Banyuring
15. Penglatan	Panarukan
16. Alasangker	Jinengdalem
	Penglatan
	Alasangker, Poh, dan Tenson ¹

Dilihat dari segi perkembangan Kota Singaraja dengan pelabuhan lautnya di Pabean Buleleng, terdiri atas beberapa kampung dan *banjar* yaitu :

1. Kampung Cina (Pecinan)
2. Kampung Sasak
3. Kampung Bugis
4. Kampung Anyar

5. Kampung Kejanan
6. Banjar Bali
7. Banjar Jawa
8. Banjar Kaliuntu²

2.2 *Pertumbuhan Penduduk*

Tentang pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng khususnya di Kota Singaraja dari tahun 1900 sampai dengan sebelum tahun 1930 dapat dikatakan tidak ada sumber yang pasti, ini disebabkan pada waktu itu pencatatan penduduk kurang mendapat perhatian. Baru sesudah tahun 1930 ada pencatatan yang lebih terperinci. Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan bagaimana komposisi penduduk di Bali Utara, dapat dilihat pada tabel berikut.³

Distrik (Kecamatan)	Jumlah Penduduk Tahun 1920
1. Buleleng	32910 orang
2. Sukasada	20518 orang
3. Kabutambahan	12876 orang
4. Tejakula	17118 orang
5. Sawan	27498 orang
6. Pengastulan	42983 orang
7. Banjar	24416 orang
	Jumlah 178322 orang

Jumlah Penduduk berdasarkan atas pengelompokan suku bangsa :

Suku Bali

1. Beragama Hindu	166121 orang
2. Beragama Islam	5119 orang
3. Beragama Kristen	120 orang
	Jumlah : 171360 orang

Suku bangsa lain

1. Jawa	844 orang
2. Madura	1036 orang
3. Sasak	731 orang
4. Bugis	690 orang
5. Mandar	460 orang
6. Manado	15 orang
7. Ambon	<u>37 orang</u>

Jumlah : 3813 orang

Penduduk Asing

1. Eropa	131 orang
2. Tionghoa	2521 orang
3. Timur Asing lainnya	<u>497 orang</u>

Jumlah : 3149 orang

Jumlah keseluruhan : 178322 orang

2.3 Sistem Sosial**2.3.1 Stratifikasi Sosial**

Pelapisan masyarakat di Bali pada masa kolonial masih mencerminkan struktur masyarakat tradisional. Demikian juga halnya dengan stratifikasi sosial yang ada di Singaraja, pelapisan masyarakat berdasarkan atas empat tingkatan yaitu golongan Brahmana, golongan Ksatria, golongan Wesia dan golongan Sudra. Pelapisan masyarakat seperti ini oleh masyarakat di Bali pada umumnya dikenal dengan istilah *catur warna*, *catur jatma* atau *catur wangsa*. Di sini kata *warna* atau *wangsa* sama artinya dengan kast-, sehingga konsep kasta di Bali menurut lontar *Brahmoka Widi Sastra* adalah berdasarkan pembagian tugas pekerjaan sesuai dengan *dhrama*-nya masing-masing, suatu tugas atau kewajiban suci dan benar.⁴

Di dalam masyarakat tradisional, seperti masyarakat di Singaraja pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya

sebelum kena pengaruh kebudayaan Barat, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan ikatan keturunan. Hal ini sangat ditunjang oleh sistem keagamaan menurut agama Hindu yaitu adanya pemujaan terhadap para leluhur, sehingga setiap kelompok kekerabatan yang berdasarkan ikatan keturunan mempunyai tempat pemujaan leluhur yang disebut *sanggah* atau *pamerajan*. Pengelompokan seperti tersebut di atas mendorong pula masing-masing kasta membentuk kelompok kekerabatan baru dengan mengambil salah satu atau seorang nenek moyang sebagai pangkal perhitungan. Pengelompokan seperti ini selalu berorientasi kepada nenek moyang, menurut istilah bahasa Bali disebut *kawitan* atau *kemulan*.⁵ Sebagai contoh dapat dilihat pada kasta Brahmana Siwa timbul pengelompokan seperti Brahmana Kemenuh, Brahmana Keniten, Brahmana Manuaba, Brahmana Mas dan Brahmana Patapan, demikian pula pada kasta Ksatria timbul pengelompokan baru yaitu Ksatria Dalem yang merupakan keturunan langsung Sri Kresna Kepakisan, seorang bupati yang diangkat oleh raja Majapahit untuk memerintah di Bali. Keturunan Ksatria Dalem ini sekarang menyandang gelar *cokorda*, sedangkan kasta Ksatria lainnya yaitu *Ksatria Jawa*, golongan ksatria yang datang kemudian, menyandang gelar *gusti*.

Demikian pula pada kasta Wesia dan Sudra, mereka juga membentuk kelompok berdasarkan ikatan keturunan yang disebut *dadia*. Masing-masing *dadia* mempunyai tempat pemujaan leluhur sendiri yang dinamakan *pura dadia* atau *pura paibon*.

Stratifikasi sosial berdasarkan konsep kasta tadi tampak pengaruhnya pada pembagian tugas dalam masyarakat, seolah-olah tugas dan kewajiban dari masing-masing golongan sudah diatur oleh adat atau *dresta*, seperti golongan Brahmana mempunyai tugas di bidang agama, golongan Ksatria di bidang pemerintahan, golongan wesia di bidang perdagangan dan pertanian, sedangkan golongan Sudra berkewajiban membantu ke tiga golongan tersebut.⁶ Di dalam adat istiadat yang menyangkut masalah tata cara pergaulan, termasuk beberapa sistem sosial

seperti sistem perkawinan, menyebabkan kedudukan golongan Brahmana dan golongan Ksatria menduduki tepat yang terhormat. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini adalah kedudukan pendeta dalam bidang agama. Kedudukan dan peranan (fungsi) seorang pendeta dalam masyarakat Bali yang beragama Hindu dengan mudah dapat kita lihat dalam berbagai bentuk upacara, karena setiap upacara keagamaan diselesaikan oleh seorang pendeta. Di dalam masyarakat agraris, fungsi pendeta semakin menonjol dalam kaitannya dengan upacara pertanian seperti menentukan hari baik untuk memulai pembukaan tanah, menanam benih sampai upacara pemotongan padi. Di samping itu masih banyak lagi tugas-tugas pendeta dalam menyelesaikan upacara adat keagamaan. Dalam masyarakat Bali upacara keagamaan yang berkaitan dengan inisiasi disebut *manusa-yadnya* yaitu upacara dari mulai manusia lahir, upacara tiga bulan, upacara enam bulan, upacara menginjak dewasa, potong gigi, upacara perkawinan sampai upacara kematian atau pembakaran mayat, disebut juga upacara *ngaben*. Kelompok upacara yang lebih besar disebut *panca yadnya*, meliputi upacara *dewa-yadnya* (korban suci untuk pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa); *pitra-yadnya* ialah korban suci untuk para Rsi; *bhuta-yadnya* ialah korban suci untuk makhluk penjaga alam semesta dan *manusa-yadnya*.

Sejalan dengan apa yang tersirat di dalam lontar *Brahmokta Widi Sastra*, seolah-olah para pendeta itu merupakan dewa-dewa di bumi dan upacara yang mereka lakukan di bumi ini merupakan kekuatan yang luar biasa terhadap alam semesta, sehingga dua pusat kekuatan dan kekuasaan yang ada pada raja dan pendeta dapat hidup secara berdampingan, cenderung untuk tetap mempertahankannya melalui peraturan-peraturan yang menempatkan dirinya pada kedudukannya yang mulia dan terhormat,⁷ sedang dipihak lain yaitu golongan Wesia dan Sudra sebagai golongan pekerja atazu penggarap tanah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, stratifikasi sosial berdasarkan sistem kasta juga menciptakan struktur sosial

yang berdasarkan atas kelahiran, kekayaan dan status, ini berarti pula tinggi rendahnya status seseorang dapat ditentukan oleh ke tiga faktor tersebut di atas.⁸

2.3.2 *Interaksi Sosial*

Dalam menjelaskan hubungan antara golongan kasta yang satu dengan yang lain dapat dilihat dengan yang lain dapat dilihat dalam kotak pergaulan sehari-hari atau dalam sistem pergaulan sehari-hari atau dalam sistem pergaulan, di dalam masyarakat Bali mengenal istilah *pasidikaran* yaitu hubungan internal dalam golongan dan *pabrayan* atau *patimpalan* yaitu hubungan eksternal, hubungan antara golongan satu dengan antara golongan satu dengan yang lainnya. Semua hubungan ini diatur oleh *dresta* yaitu adat kebiasaan yang berhubungan dengan masalah etika, tata kesopanan yang berlaku antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Seperti telah diuraikan di atas, masyarakat Bali mengenal tingkatan-tingkatan berdasarkan atas kasta. Golongan Brahmana dinaggap lebih tinggi dari golongan Ksatria, demikian pula golongan Ksatria lebih tinggi dari golongan Wesia dan golongan Wesia lebih tinggi dari golongan Wesia dan golongan Wesia lebih tinggi dari golongan Sudra. Namun secara individu dapat kita lihat berdasarkan atas status dan fungsinya di dalam masyarakat. Sehubungan dengan pertingkatan kasta tadi, masyarakat mengenal dengan pertingkatan kasta tadi, masyarakat mengenal adanya pertingkatan bahasa, yaitu bahasa *halus*, *madya* dan *kasaran*, atau *utama*, *madya* dan *nista*. Sesuai dengan *dresta*, golongan Sudra harus berbahasa halus kepada golongan Triwangsa boleh berbahasa *nista* kepada golongan Sudra atau berbahasa *madya* atau *tengahan* kepada golongan Sudra yang umurnya lebih tua. Apabila norma atau *dresta* ini dilanggar, misalnya golongan Sudra berbahasa kasar kepada golongan Triwangsa, maka Triwangsa tadi dapat *susud* atau *petita*, *candala*, yang berarti kastanya harus diturunkan menjadi kasta Sudra.⁹

Aturan-aturan (*dresta*) semacam ini masih banyak terdapat

dalam hubungan antara kasta yang satu dengan yang lain, menyangkut masalah tata cara duduk, berjalan, bercakap-cakap, berbagai adat upacara dan yang paling menonjol adalah dalam soal perkawinan. Di dalam masyarakat tradisional di Bali ada dikenal suatu peraturan perkawinan antar kasta yang disebut *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Wulu*. *Asu Pundung* melarang terjadinya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dari kasta Ksatria, Wesia dan Sudra kawin dengan seorang gadis dari kasta Brahmana, sedangkan *Alangkahi Karang Wulu* melarang seorang laki-laki dari kasta Wesia dan kasta Sudra kawin dengan seorang gadis atau wanita dari kasta Ksatria. Sehingga dari aturan-aturan tersebut di atas tampak jelas bahwa seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah dilarang kawin dengan wanita yang berkasta lebih tinggi, bila hal ini dilanggar dapat menimbulkan sanksi yaitu pihak laki-laki yang bersalah dapat dijatuhi hukuman penjara atau hukuman buangan (*selong*), sedangkan pihak wanita ia dapat diturunkan kastanya menjadi kasta Sudra.

Dalam kaitannya dengan tugas-tugas sosial seperti gotong-royong dalam perbaikan pura desa yang menjadi tempat persembahyangan untuk semua golongan, hubungan diantara keempat golongan tadi dapat bekerja sama dan sudah diatur oleh aturan-aturan setempat yang berlaku di desa adat bekerja sama dan sudah diatur oleh aturan-aturan setempat yang berlaku di desa adat masing-masing.

Berbicara masalah interaksi sosial ini, tidaklah lengkap apabila kita tidak ketengahkan masalah hubungan antar etnis yang ada di sekitar Kota Singaraja. Dilihat dari letaknya, faktor geografis memang lebih memungkinkan orang-orang Timur Asing dan suku-bangsa lainnya untuk singgah dan bermukim dibandingkan dengan daerah lainnya di Bali. Kota Singaraja sebagai kota perdagangan telah mencerminkan masyarakat pantai yang bersifat pluralistis, terdiri dari beberapa suku bangsa seperti Jawa, Madura, Bugis dan sebagainya, disamping itu ada juga perkampungan orang-orang Timur Asing seperti Kampung

Arab, dan kampung Cina. Rupanya sejak ditetapkannya Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok pada tahun 1882 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sudah timbul perhatian untuk menertibkan orang-orang Timur Asing yang berada di Bali Utara, sehingga dengan penetapan *Staatblad* 1883: a67 ditetapkan Pabean (pelabuhan) Buleleng, Tumukus dan Sangsit sebagai tempat permukiman orang Cina dan Pabean Buleleng sebagai tempat permukiman untuk orang-orang Timur Asing lainnya.^{1 0}

Hubungan orang-orang Timur Asing dengan orang-orang Bali adalah menyangkut kontrak-kontrak perdagangan terutama dengan masyarakat pedalaman. Mereka pada umumnya menjadi pedangan kelontong. Barang dagangannya berupa barang-barang kelontong tetapi lama-kelamaan berkembang dan meningkat menjadi distributor. Akibat kemajuan-kemajuan di bidang komunikasi, terutama akibat kedudukan Kota Singaraja sebagai kota pelabuhan, banyak orang-orang Bugis, Jawa, Madura, Mandar, Ambon, Sasak yang menetap menjadi pedagang di daerah pantai dan membuat perkampungan di sekitar Pelabuhan Buleleng. Kontak-kontak diantara mereka kebanyakan menyangkut soal-soal perdagangan.

Selain terdapat permukiman beberapa suku bangsa, ada juga pendatang-pendatang baru dari daerah lain di Bali terutama orang-orang dari Desa Seraya dan Desa Bubug, Karangasem yang datang ke Singaraja sebagai pengantar hewan-hewan yang diperdagangkan seperti kerbau, sapi, babi. Mereka itu lama-kelamaan ada juga yang menetap sebagai buruh pelabuhan.

2.4 *Kehidupan Ekonomi*

2.4.1 *Mata Pencaharian*

Hampir kebanyakan penduduk pulau Bali hidup dari hasil pertanian. Masyarakat telah mengenal sistem irigasi yang disebut *subak*, yaitu suatu organisasi perairan yang bertugas mengatur pembagian air di sawah. Perkumpulan (*sekeha*) subak ini telah memiliki peraturan tertulis yang disebut *sima* atau *awig-awig*

subak.¹¹ Perkumpulan subak memiliki kepengurusan yang terdiri dari seorang pemimpin yang disebut *klian subak*, dibantu oleh seorang *penyarikan* (juru tulis), seorang *sedahan tembuku* yang bertugas mengurus pajak dan sebagai bendahara, seorang *juru arah* yang bertugas memanggil anggota subak apabila ada pertemuan. Aktivitas perkumpulan subak antara lain membuat bendungan, membagi air dengan membuat selokan-selokan, menjaga air di sawah (*metelik*). Penghasilan (pemasukan) perkumpulan subak diperoleh dari denda-denda para anggota subak akibat pelanggaran *awig-awig*.

Sebagai masyarakat agraris yang memiliki kebudayaan Hindu, setiap kegiatan di sawah selalu dihubungkan dengan soal-soal keagamaan. Berbagai upacara pertanian ditunjukkan kepada Dewa Kemakmuran yaitu Dewi Sri yang dipuja pada sebuah pura kecil yang ada di tengah-tengah sawah, dinamakan pura Uluan Suwi atau pura Uluan Carik.

Sistem perekonomian tradisional dalam masyarakat agraris aktivitas perekonomian bersumber pada masyarakat desa. Semua hasil produksi pertanian pada umumnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Namun hal seperti ini bukan berarti bahwa masyarakat desa sistem perekonomiannya tertutup sama sekali, bahkan sering terjadi pertukaran kebutuhan melalui perdagangan. Oleh sebab itu pada umumnya setiap desa mempunyai pasar dan mempunyai hari pasaran. Untuk masyarakat di Bali hari pasaran diteapkan tiga hari sekali yaitu pada hari Beteng, Kajeng dan Busaya. desa sebagai sumber ekonomi juga sebagai pemberi utama untuk perekonomian masyarakat kota. Sebagian besar hasil pertanian ang diperdagangkan di kota, datangnya dari desa yang berdekatan. Kontak ekonomi seperti ini kemudian besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan kota. Letak dan susunan kota dibangun menurut pola tradisional oleh penguasa yaitu raja, sehingga apa yang tampak pada tata dan susunan bangunan puri di Bali sudah mengikuti pola bahwa letak puri harus selalu berada di sebelah utara pasar.

Untuk kepentingan kemakmuran desa, masyarakat telah mengenal sistem gotong royong yang disebut *nedunin desa* atau *ngayangah desa*. Hal ini sangat mempengaruhi timbulnya organisasi-organisasi sosial dalam lapangan ekonomi pertanian seperti *sekeha memula* yaitu perkumpulan menanam padi, *sekeha manyi* atau *sekehe maderep* yaitu perkumpulan mengemtam padi, *sekeha semal* yaitu perkumpulan menangkap tupai, *sekeha kopi* yaitu perkumpulan menanam dan memetik kopi. Di Bali Utara perkumpulan memetik dan menanam kopi ini sudah berdiri sejak tahun 1919 di desa Munduk dan di desa Goleg.^{1 2}

2.4.2 *Lalu – lintas Darat*

Untuk memperlancar komunikasi antar kota maupun antar distrik (kecamatan), pemerintah Belanda telah merintis pembukaan-pembukaan jalan untuk umum. Perkembangan jaringan jalan di Bali Utara dalam kaitannya dengan Kota Singaraja sebagai ibukota Keresidenan Bali dan Lombok, menduduki peranan yang sangat penting. Pada perencanaan terakhir tahun 1917 telah dapat dibuka beberapa jaringan jalan yang menghubungkan desa Pengastulan ke Tejakula melalui Paben Buleleng dan Sangsit. Demikian juga beberapa jembatan telah dapat diselesaikan yaitu jembatan di atas Sungai Banuraras pada jalan dari Singaraja ke Celukan Bawang telah dimulai pembuatannya sejak tahun 1917. Pada Tukad (sungai) Yeh Lalang dekat Tejakula, pada jalan dari Singaraja melalui Sangsit menuju Tejakula telah dibangun sebuah jembatan untuk mengatasi banjir dalam bulan Februari 1918.

Sebuah jembatan di atas Tukad Penarukan pada jalan dari Singaraja menuju Jinengdalem melalui Penarukan telah dapat dibangun, demikian juga sebuah jembatan pada jalan dari Moyang menuju Tabanan yaitu jalan dari Singaraja melalui Pupuan dan Tabanan menuju kota Denpasar. Pada tahun 1918 dapat diselesaikan sebuah jembatan yang menghubungkan Singaraja dengan Anturan yaitu di atas Tukad Banymala dan

sebuah jembatan lagi dari Tejakula menuju daerah Karang-
asem.^{1 3}

Singaraja sebagai pusat pemerintahan, mempunyai tiga jalur jaringan lalu-lintas yang menghubungkan Bali Utara dengan Bali Selatan yaitu pertama: jalan menuju Kubutambahan dan Kintamani menuju Denpasar, ini dapat dibuka sejak tahun 1926. Kedua adalah jalur melalui Bubunan dan Pupuan, ketiga: bersamaan dengan jalur yang kedua tadi dapat juga dibuka jalur melalui danau Bratan yang dapat diselesaikan pembuatannya pada tahun 1926. Kedua jalur tersebut di atas merupakan jalan utama yang diaspal, sedangkan jalan Gitgit pada saat itu merupakan jalan darurat untuk perhubungan antara Singaraja dengan Sukasada. Jarak antara Singaraja dengan Denpasar melalui Kintamani adalah 118 km, melalui Bubunan adalah 113 km, sedangkan jalan yang baru dibuat melalui Bedugul dan Danau Bratan hanya berjarak 78 km.

Jaringan jalan yang kedua tadi yaitu melalui Bubunan sangat penting artinya bagi masyarakat, karena memperlancar arus lalu-lintas dan juga bidang perdagangan, terutama mempermudah angkutan kopi dari Munduk dan Pupuan.^{1 4}

2.4.3 *Perdagangan Laut*

Dalam bidang perdagangan melalui lalu-lintas laut, hubungan perdagangan antara Bali dengan Batavia (Jakarta) sudah berlangsung sejak lama, terutama dalam hal perdagangan budak. Menurut seorang penulis bernama A.K. Nielsen mengatakan bahwa antara abad 17-18 aktivitas perdagangan antara Bali dengan Batavia berkisar pada masalah perdagangan budak.^{1 5} Beberapa buah kapal dari Bali dan Lombok yang berlayar menuju Batavia dengan isi muatan dari Bali antara lain : budak laki-laki dan wanita, beras, gula, asam, minyak kelapa, babi, pinang, hewan dan bahan makanan untuk anak buah kapal, malam, kayu, garam dan itik. Dari Lombok mengangkut muatan berupa : beras, malam, kayu, sapen, garam dan juga budak wanita. Sedangkan dari Batavia dikirim ke Bali antara

lain berupa barang-barang pecah-belah, porselin, kain, besi tua, obat-obatan, ikan asin, benda tembaga, barang-barang dari Tiongkok, menyan dan tembikar.

Kapal-kapal dari Batavia menuju ke Lombok membawa muatan berupa laken merah, kain, ketumbar, peci dan besi.¹⁶ Arus perdagangan budak Bali ke Batavia ini dapat kita mengerti bila kita hubungkan dengan situasi politik Kompeni Belanda pada masa itu. Untuk menyusun kekuatan militer di Indonesia, Kompeni sangat banyak memerlukan tentara. Dari tulisan C. Lekkerkerker kita peroleh keterangan bahwa pada jaman Kompeni dan masa pemerintahan Daendels banyak orang Bali dijadikan tentara yang sangat berani.¹⁷

Sesudah berakhirnya "Perang Jawa" pada tahun 1830, petugas-petugas pegawai sipil Belanda yang ditempatkan di Kuta daerah Badung (Bali Selatan), tidak lagi mempunyai aktivitas apa-apa. Pada tahun 1839 agen NHM (*Nederlandch Handels Maatshappij*) Surabaya berhasil membuka sebuah kantor di Kuta. Apa yang dikemukakan oleh Lekkerkerker bahwa NHM ini belum begitu tampak mengadakan kontak-kontak dengan raja-raja di Bali karena raja-raja telah mempunyai *subandar* (syahbandar) yang bertugas mengurus hubungan dengan orang Asing, terutama yang berhubungan dengan soal perdagangan. Setelah tahun 1849 perdagangan di Kuta semakin sepi dan akhirnya pindah ke Bali Utara. Sejak itu pusat perdagangan ada di Pelabuhan Buleleng.¹⁸

Dari segi geografis memang kota Singaraja sebagai kota pelabuhan lebih memungkinkan dapat bertambah ramai dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya di Bali. Pelabuhan Buleleng sejak dahulu telah ramai dikunjungi kapal-kapal dan perahu-perahu dagang. Letak Pelabuhan Buleleng dengan Kota Singaraja kurang-lebih berjarak dua kilometer, menjadi tempat persinggahan dan pertukaran barang para pedagang yang berlayar dari Batavia, Surabaya, Makassar (Ujungpandang) dan pulau-pulau di Nusa Tenggara.

Dalam hubungannya dengan sistem perdagangan laut, peranan syahbandar sangat penting. Di tiap pelabuhan atau tempat-tempat persinggahan kapal, raja menempatkan seorang wakil atau petugas untuk mengurus soal-soal yang berhubungan dengan masalah perdagangan. Disana didirikan sebuah bangunan yang dinamakan *bandara* (Belanda : *bandarij*), juga disebut *pabean*. Bangunan tersebut berbentuk bangsal (*loodsen*), dipergunakan untuk memeriksa para penumpang serta barang-barang yang diperdagangkan keluar-masuk pelabuhan. Di Pualu Bali dan Lombok orang yang bertugas di pelabuhan sebagai kepala pelabuhan dinamakan *subandar*.

Seorang Subandar mendapat wewenang penuh dari raja untuk memungut cukai pelabuhan, sebaliknya para Subandar berkewajiban untuk menyerahkan *upeti* (pajak) kepada raja. Sudah menjadi kelajiman raja-raja di Bali maupun di Lombok mengangkat seorang asing sebagai subandar, umumnya seorang Tionghoa.

Tugas pokok subandar adalah menertibkan pelabuhan dan kadang-kadang dapat juga sebagai konsul bagi orang asing dan sebagai wakil raja. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari ia dibantu oleh serang *mata-mata* yaitu orang yang diangkat oleh raja untuk mengontrol para subandar. Disamping itu ia juga dibantu oleh seorang notaris yang bertugas membuat akte transaksi dalam kaitannya dengan jual-beli.¹⁹ Apabila terjadi kekacauan atau keributan di pelabuhan, subandar dapat meminta bantuan kepada seorang *perbekel* (camat) atau melaporkan kepada *kanca negara* (polisi). Sudah menjadi kebiasaan bahwa semua kapal maupun perahu yang mau berlabuh di tiap pelabuhan di Bali, diwajibkan membayar pajak pelabuhan yang dalam bahasa Bali dinamakan *labuh batu* atau *upetin paswanan*.

Suatu hal yang penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan sistem pelayanan maupun perdagangan laut ialah berlakunya apa yang dikenal dengan hak "*tawan karang*". Di Bali hak tawan karang ini dikatakan telah melembaga dikalang-

an masyarakat. Telah menjadi hak daris suatu kerajaan di Bali bahwa apabila ada kapal atau perahu terdampar di sebuah pantai di wilayah suatu kerajaan, maka semua muatan perahu atau kapal yang terdampar itu menjadi milik kerajaan atau penduduk pantai itu sebagai barang rampasan. Awak kapal atau penumpang perahu itu dapat dijadikan budak, kalau mereka itu melawan dapat dibunuh.

Di dalam ketentuan "tawan karang" ada disebutkan bahwa kapal-kapal yang terdampar itu hanya boleh ditolong oleh penduduk pantai dari wilayah kerajaan tersebut.²⁰ Korn merumuskan "tawan karang" (*klipercht*) sebagai berikut :

Het kliprecht zouden de Balische vorsten wel hebben voorgeteld als een "recht op de goede gaven, die Batara Baroena, de god van zee en duisternis, goedgunstig op hun straden wierp".²¹

Masyarakat Bali masih membedakan antara istilah *tawan karang* dengan *melayar kampih*. Menurut Utrecht bahwa *melayar kampih* itu adalah apabila perahu yang terdampar itu pada pasir pantai di mana penumpangnya dapat menolong dirinya sendiri tanpa meminta bantuan rakyat pantai. Sedangkan *tawan karang* adalah di mana perahu atau kapal itu terdampar pada karang laut yang terletak di muka pantai yang mengandung pengertian bahwa karang-karang itu termasuk daerah perairan kerajaan dan anak kapal dan muatannya hanya dapat ditolong oleh rakyat pantai.²²

Masalah tawan karang ini sering menimbulkan konflik antara raja-raja di Bali dengan orang-orang Belanda karena pihak Belanda merasa haknya dikurangi atau merasa tidak aman dalam pelayaran dan menganggap penduduk pantai Gali melakukan tindakan kejahatan dan perampokan. Hal ini terbukti pernah Komisaris tinggi pemerintah Belanda yaitu Van den Broeck melaporkan dalam sebuah laporannya yang ia tulis dalam tahun 1818 menuturkan bahwa perahu yang dikirim membawa beras ke Buleleng terdampar di perairan Badung dan raja Badung me-

rampas seluruh isi muatan perahu tersebut.²³ Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan hampir semua konflik antara raja-raja di Bali dengan pihak Belanda pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 sehingga menimbulkan perang yang terjadi di Bali.

2.5 Struktur Pemerintahan

Sejak ditetapkannya Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok pada tahun 1882, pemerintahan di Bali secara perlahan-lahan mengalami perubahan. Situasi politik di Bali sampai permulaan abad ke-20 baru memungkinkan pemerintah Belanda turut campur sepenuhnya dalam soal pemerintahan.

Pada waktu itu sistem pemerintahan di Bali dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : (1) *Rechtsreeks bestuurd gebied*: Buleleng dan Jembrana; (2) *Zelfbestuurende landschappen*: Badung, Tabanan, Klungkung dan Bangli, dan (3) *Stedehouder bestuur*: Gianyar dan Karangasem.²⁴ Perlu dijelaskan bahwa kedua daerah yang termasuk Bali Utara yaitu Buleleng dan Jembrana sejak bagian kedua abad ke-19 sudah berada di bawah pemerintahan langsung dari Pemerintah Hindia Belanda. Di daerah Jembrana sejak tahun 1866 pemerintah Belanda tidak lagi mengangkat *regent* baru, sedangkan pemerintahan diserahkan kepada pengawasan langsung seorang *controleur*. Demikian juga Buleleng sejak tahun 1872 sesudah terjadi pemberhentian *regent* dari jabatannya, pemerintahan diserahkan pengawasan langsung kepada *assistent resident*.

Baru kemudian setelah ditetapkannya Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok, Pemerintah Belanda menempatkan seorang *resident* di Singaraja, sedangkan di Jembrana ditempatkan seorang *controleur*. Sesudah Pulau Bali dapat ditaklukkan secara keseluruhan pada tahun 1908, di Jembrana mulai ditempatkan *civiel gezaghebber* (pejabat

pemerintahan sipil) dan pada kantor residen di Singaraja hanya terdapat seorang juru tulis (*klerk*).

Keadaan birokrasi kolonial antara tahun 1908 sampai tahun 1937, baik pada pemerintahan orang Belanda (*Nederlandsch bestuur*) maupun pada pemerintahan pribumi (*Inheems bestuur*) masih sangat sederhana. Hal ini dapat kita mengerti bahwa Pemerintah Belanda belum dapat sepenuhnya menerapkan sistem birokrasi Barat secara keseluruhan karena sarana maupun tenaga yang terdidik belum tersedia. Dalam usaha menerapkan sistem birokrasi Barat ini, pemerintah selalu berusaha menyesuaikan dengan struktur pemerintahan sebelumnya yaitu struktur pemerintahan tradisional dan dalam mengadakan perubahan-perubahan selalu memperhatikan sistem demokrasi yang ada dalam masyarakat di Bali.²⁵ Perubahan yang penting dalam struktur pemerintahan di Bali dimulai sejak tanggal 1 Juli 1938 yaitu pembentukan pemerintahan swapraja (*zelfbestuur*).

Sistem birokrasi kolonial di Bali masih dibagi menjadi dua bagian yaitu pemerintahan orang Belanda dan pemerintahan pribumi. Struktur pemerintahan pribumi masih mengikuti sistem pemerintahan tradisional. Pucuk pemerintahan dipegang oleh *zelfbestuurder* atau dengan titel Anak Agung, sedangkan daerah kekuasaannya disebut *negara*. Di masing-masing negara (*landschap*) dibagi menjadi beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang *punggawa*, sedang di tingkat distrik membawahi beberapa *perbekalan* yang dikepalai oleh seorang perbekel atau *ben-
desa*.²⁶

Di masing-masing *negara* terdapat suatu majelis yang bernama *paruman negara*, suatu majelis yang terdiri dari para *punggawa*, seorang anggota *raad kerta*, beberapa anggota yang terdiri dari *sedahan* dan *perbekel* dan seorang partikelir (swasta) yang ditunjuk oleh *zelfbestuurder* atas persetujuan *resident*. Fungsi paruman negara adalah sebagai penasihat *zelfbestuurder*.

Untuk mengurus kepentingan bersama di antara kedelapan *negara*, dibentuk suatu badan yang disebut *paruman agung*. Ketua badan ini langsung dipegang oleh *residen*, anggotanya terdiri dari kedelapan *zelfbestuurder* dan dua orang wakil dari masing-masing *negara*. Sebagai suatu badan, *paruman agung* mempunyai suatu sekretariat. Masalah-masalah yang dibicarakan dalam *paruman agung* itu antara lain mengenai hutan, perbaikan jalan raya dan sebagainya.²⁷

Masuknya sistem birokrasi modern dalam sistem pemerintahan pribumi, tampak mulai ada beberapa perubahan. Dahulu pada masa pemerintahan tradisional, raja mengatur pemerintahan berkedudukan di istananya sebagai pusat aktivitas pemerintahan. Setelah masuknya sistem birokrasi modern dalam struktur pemerintahan kolonial, raja sebagai *zelfbestuurder* tidak lagi menggunakan istananya sebagai aktivitas pemerintahan melainkan sudah berada di sebuah kantor yang disebut kantor *landschap*, lengkap dengan pegawai-pegawai administrasi yang mempunyai tugas pekerjaan tertentu. Dari sudut pembagian tugas tampak jelas sudah ada difrensiasi pekerjaan yang mencerminkan adanya gejala modernisasi.

Dalam struktur pemerintahan pribumi, rajayang diberi titek Anak Agung dalam jabatannya sebagai *zelfbestuurder* menduduki tempat yang tertinggi, kemudian punggawa, perbekel, sampai pada klian. Di sini tampak bahwa pemerintahan pribumi masih bersifat dualistis, di satu pihak masih mengikuti struktur pemerintahan tradisional, sedang di pihak lain sudah mengikuti pola administrasi dan politik pemerintahan yang digariskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Demikian pula kita lihat d-lam sistem peradilan, bahwa berdasarkan Ordonansi 1882, peradilan bumiputra di Bali dinamakan *Raad Kerta* yang ada di masing-masing negara (*landschap*). Para anggotanya terdiri dari seorang ketua, dijabat oleh pegawai Belanda yaitu *controleur*, wakil ketua dijabat oleh *regent* (Anak Agung) dan dibantu oleh tiga orang lainnya.

Perkara yang berhubungan dengan urusan kriminal diadili oleh pengadilan *Raad Kerta*, sedangkan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat, diadili oleh pengadilan pribumi atau *land-raad*.²⁸

Untuk daerah Bali ada dua daerah kekuasaan hukum dalam memutuskan peradilan *raad kerta* yaitu Buleleng dan Jembrana diputuskan oleh resident Bali dan Lombok yang berkedudukan di Singaraja, daerah Bali Selatan yang meliputi enam daerah lainnya yaitu Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli Klungkung dan Karangasem diputuskan oleh *asistent resident* yang berkedudukan di Kota Denpasar.²⁹

Dalam membicarakan struktur pemerintahan di Singaraja pada masa kolonial, tidaklah lengkap kalau kita tidak membicarakan hubungan antara raja atau *regent* yang berasal dari penguasa pribumi dengan penguasa-penguasa Belanda dalam bidang pemerintahan, sebagai tautan tuan hamba (*patron-client*). Hal ini dimungkinkan terjadi karena kedudukan *resident* maupun *asisten resident* dengan *regent* dalam hirarki (struktur) birokrasi kolonial. Seperti telah disinggung di atas bahwa Pemerintah Belanda memisahkan secara administratif dua jalur pemerintahan yaitu pemerintahan orang-orang Belanda yang dikenal dengan *Binnenlands Bestuur* (BB) dan pemerintahan pribumi yang dinamakan *Landschap*. Pemisahan jalur ini akan mempertajam serta memperjelas lagi tautan tuan hamba antara *Binnenland Bestuur* dengan *Landschap* atau *negara*.

Kedudukan pegawai-pegawai Belanda dari tingkat *resident* sampai *controleur* berada pada status yang terhormat. Lebih-lebih pada waktu berlangsungnya peresmian pemakaian titel Anak Agung, Cokorda, Dewa Agung terhadap raja-raja di Bali, para *regent* ini melakukan sumpah setia terhadap pemerintah Belanda secara adat Bali.³⁰ Di sini mulai tertanam bagaimana pertautan tuan-hamba antara raja (*regent*) sebagai hamba dengan penguasa-penguasa Belanda seperti *resident*, *asistent resident* dan *controleur* sebagai tuan, yang telah terikat oleh rasa kesetiaan.³¹

Birokrasi kolonial yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda di Bali banyak memberikan peluang terhadap terjadinya mobilitas sosial. Sistem pemerintahan yang dualistis sudah membedakan status dan fungsi antara penguasa pribumi dengan penguasa orang-orang Belanda. Kedudukan raja pada masa tradisional yang mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur pemerintahannya, kemudian pada masa kolonial kedudukan seorang *regent* sejajar dengan kedudukan seorang *controleur*. Di sini tampak pergeseran status yang menurun. Pengangkatan seorang *regent* diatur berdasarkan surat ketetapan (*besluit*) dari Gubernur Jenderal yang diterimakan melalui *residen*, ini berarti bahwa *regent* dibawah kedudukan *assisten resident* dan *resident*. Demikian juga pengangkatan pegawai-pegawai pada kantor *Binnenlands Bestuur*, pengangkatannya berdasarkan legal rasional. Status sosial tidak lagi menjadi ukuran melainkan digantikan oleh jenjang pendidikan. Pergeseran fungsi dan posisi sangat dimungkinkan dari golongan elit tradisional ke elit modern, sehingga dalam birokrasi kolonial kaum inteligensia menduduki fungsi yang cukup tinggi.

2.6 Pendidikan

Sejalan dengan penyempurnaan dalam bidang pemerintahan, maka untuk kepentingan tenaga administrasi, Pemerintah Hindia Belanda mulai berusaha membuka beberapa sekolah bumiputra. Pada tahun 1907 pemerintah berhasil membuka di tiga tempat di Bali yaitu di Bubunan (Buleleng), Gianyar dan di Denpasar. Pada tahun itu juga di Pabean Singaraja berhasil dibuka sebuah sekolah Tionghoa bernama *Tionghoa Hwee Kwan*, seperti halnya sekolah-sekolah Tionghoa lainnya yang ada di Hindia Belanda.^{3 2}

Walaupun kota Singaraja sebagai ibukota Keresidenan Bali dan Lombok, sekolah-sekolah masih sangat terbatas sehingga dalam bidang pendidikan, pulau Bali jauh lebih mundur dibandingkan dengan pendidikan di Pulau Jawa. Dalam usaha mendapatkan tenaga administrasi yang dirasakan sangat men-

desak, dibukalah *Nomaal-cursus* di Kota Singaraja yang khusus mendidik calon-calon guru dari kalangan orang Bali sehingga tidak lagi mendatangkan guru-guru dari Jawa. Mulai bulan November 1914 Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka sekolah-sekolah pribumi yang dikenal dengan Sekolah Desa di beberapa tempat di Bali, sedangkan yang ada di daerah Bali Utara adalah Sukasada dan Kubutambahan. Pada tahun 1920 di desa Sudaji dapat dibuka sebuah *Tweede Klasse Inlandsche School*.

Untuk memperlancar komunikasi antara penduduk pribumi dengan orang-orang Belanda terutama dalam tenaga administrasi pada birokrasi kolonial, di samping kecakapan dalam membaca dan menulis, faktor pemahaman bahasa Belanda sangat dipentingkan. Untuk keperluan itu maka pada tahun 1914 di kota Singaraja dibuka sebuah *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), dan menurut laporan L.U. van Stenis yang menjabat Resident Bali dan Lombok pada saat itu mengatakan bahwa pembukaan sekolah-sekolah mendapat sambutan yang baik dari orang-orang Bali.³³ Pada tahun itu juga di Bali dapat dibuka beberapa Sekolah Desa, di antaranya ada yang dibuka di Bali Utara sebanyak 15 sekolah. Dua tahun kemudian di Singaraja dapat didirikan *Europeesche Lagere School* yaitu Sekolah Rendah yang mendapat pelajaran bahasa Belanda.

Pertumbuhan sekolah-sekolah di Bali dan di Singaraja pada khususnya boleh dikatakan sangat lambat. Sampai tahun 1926 jumlah sekolah tidak banyak yang berubah. Di daerah Buleleng ada tercatat 10 buah *Tweede Klasse School*, yaitu dua buah ada di Kota Singaraja dan yang lainnya ada di Sukasada, Jinengdalem, Banjar, Bubunan, Kubutambahan, Bondalem. *Hollandsch Inlandsche School* ada sebuah yaitu di Singaraja, Sekolah Desa (*Volkschool*) ada 14 buah.³⁴ Sebagai suatu gambaran bagaimana keadaan sekolah-sekolah di Bali sampai tahun 1929 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :³⁵

onder afdeling	Europeesche Lagere school	HIS	Tweede Klasse school	Volksschool
Buleleng	1	1	8	16
Jembrana			2	3
Badung		1	5	22
Tambanan			6	22
Gianyar			3	12
Klungkung		1	3	23
Karangasem			2	11
Jumlah	1	3	29	109

Perkembangan sekolah di Bali dari tahun ke tahun sangat lambat sekali, hal ini dapat kita buktikan bahwa sekolah-sekolah di daerah Buleleng sampai tahun 1932 yang bertambah hanyalah *Volksschool* saja menjadi 33 buah.³⁶ Sampai tahun 1941, sekolah-sekolah di Bali tercatat sebagai berikut : *Volksonderwijs* seluruhnya berjumlah 195 buah, *Vervolgonderwijs* ada 33 buah, *HIS* : 4 buah, *Vakonderwijs* : 53 buah, *Ambachtsschool* ada di Denpasar, *Huishoudscholen* ada di Denpasar dan Singaraja.³⁶

2.7 Organisasi Sosial

2.7.1 Perkumpulan Suita Gama Tirta

Akibat tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap arti pendidikan sebagai sarana dalam memajukan masyarakat, timbullah beberapa gagasan dari golongan elit yang dapat digolongkan sebagai golongan terpelajar untuk mendirikan suatu organisasi sosial yang berkaitan dengan masalah pendidikan.

Pada tahun 1921 di Kota Singaraja berhasil didirikan sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang agama dan pendidikan yaitu perkumpulan *Suita Gama Tirta*, dipimpin oleh I

Gusti Putu Jelantik, salah seorang anggota *raad van kerta* di Singaraja. Perkumpulan ini bertujuan untuk memuliakan agama serta bercita-cita mengadakan pembaharuan dibidang adat-istiadat.³⁷ Adapun keanggotaan dari perkumpulan ini adalah terdiri dari semua lapisan masyarakat yaitu meliputi Caturwangsa (keempat kasta di Bali), dari kalangan pegawai, guru-guru, para pemuda dan pemuka agama yang tercantum dalam lontar-lontar. Perkumpulan *Suita Gama Tirta* dapat dikatakan sebagai pelopor membuka jalan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang agama, karena dalam tradisi masyarakat di Bali pengetahuan agama hanya boleh dipelajari oleh golongan kasta tertentu yaitu golongan Brahmana dan golongan Ksatria. Pada awal berdirinya perkumpulan ini tampak sekali ada kerjasama diantara semua lapisan masyarakat terutama hubungan antara golongan Brahmana dengan golongan Jaba atau golongan Sudra, karena pada saat itu mulai tumbuh kesadaran untuk memberikan pelajaran agama kepada semua umatnya yang memeluk agama Hindu. Perkumpulan *Suita Gama Tirta* ini hanya dapat berdiri dua tahun.

2.7.2 *Perkumpulan Shanti*

Di antara anggota perkumpulan *Suita Gama Tirta* masih terdapat yang berkemauan keras untuk memajukan masyarakat di bidang agama Hindu, atas usaha mereka itu pada tahun 1923 berhasil mendirikan perkumpulan bernama Perkumpulan Shanti. Perkumpulan ini lahir di Kota Singaraja yang anggota-anggotanya kebanyakan berasal dari *Sekolah Jongkok* yaitu suatu perkumpulan simpan-pinjam uang. Parapendiri perkumpulan Shanti adalah dari kalangan guru, pegawai dan tokoh masyarakat antara lain Wayan Ruma, Ketut Nasa, Made Kaler, Nyoman Kajeng, I Gusti Putu Jelantik, I Gusti Cakratanaya, Ida Bagus Gelgel dan Pendada Putu Geria. Kegiatan perkumpulan ini bergerak di bidang pendidikan agama Hindu dengan jalan mengadakan pembacaan lontar-lontar yang berisi ajaran agama. Sambutan masyarakat cukup besar terhadap perkumpulan Shanti,

bahkan juga mendapat perhatian dari pihak pemerintah, sehingga pada tahun 1923 berhasil mendirikan sebuah Sekolah Perempuan Shanti, membuka kursus ABC dan mengeluarkan kala warta bernama "*Shanti Adnyana*".

Semakin majunya pendidikan, banyak pemuda-pemuda Bali yang telah menamatkan pelajarannya pada Sekolah Guru dan sekolah-sekolah lainnya di Bali maupun di Jawa, timbul cita-cita untuk mengembangkan ajaran-ajaran agama di kalangan masyarakat luas dan ingin mengubah adat-istiadat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Namun cita-cita pembaharuan ini belum semuanya dapat menerima, terutama pihak golongan yang masih berpandangan tradisional. Timbul semacam pertentangan yang menjurus kepada pertentangan kasta antara golongan terpelajar yaitu dari kalangan guru-guru yang kebanyakan dari golongan Sudra dengan golongan yang masih berpandangan tradisional yaitu dari pihak golongan Triwangsa. Pertentangan paham ini menyebabkan perkumpulan Shanti juga timbul perpecahan, yaitu antara I Gusti Cakratanaya yang berpandangan tradisional dengan I Ketut Nasa seorang Kepala Sekolah di Desa Bubunan. Pertentangan paham di antara perkumpulan Shanti menyebabkan perkumpulan ini bubar, sedangkan kalawarta *Shanti Adnyana* diambil alih oleh I Gusti Cakratanaya dan kemudian nama majalah tersebut diganti dengan nama *Bali Adnyana*. Majalah ini terbit untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Januari 1924, peminan redaksi dipegang oleh I Gusti Cakratanaya dan direktornya adalah I Gusti Ketut Putra.

Peranan majalah *Bali Adnyana* dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai masmedia ikut menyebar-luaskan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan pengetahuan agama Hindu. Oleh karena majalah ini dilahirkan dalam situasi konflik yaitu pertengahan kasta antara golongan Triwangsa, sehingga ada anggapan dari pihak elit Jaba yaitu dari kalangan guru-guru yang berkasta Sudra (jaba), bahwa majalah *Bali Adnyana* memuat suara atau buah pikiran dari golongan

Triwangsa. Anggapan ini ternyata semakin kuat, sehingga timbul keinginan dari golongan Sudra untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang anggotanya hanya terdiri dari golongan Jaba, yaitu perkumpulan Surya Kanta.

2.7.3 *Perkumpulan Surya Kanta*

Perkumpulan ini berdiri sejak tanggal 1 Nopember 1925 dengan susunan pengurusnya : presiden: Ketut Sandi; wakil presiden : Ketut Nasa; sekretaris I : Nengah Metra, sekretaris II: Ketut Kaler, bendahara: Ketut Purna, komisaris terdiri atas Ketut Mudasara dan Wayan Ruma.³⁸

Mempelajari azas dan tujuan dari perkumpulan ini dapat dikemukakan beberapa hal yang penting yaitu antara lain perkumpulan Suraya Kanta bercita-cita untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat, sesuai dengan kemajuan jaman. Ternyata perkumpulan ini sudah mempunyai pandangan yang sangat luas, dimana perkumpulan ini bercita-cita untuk menyebarkan kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan, karena pada saat itu keadaan di Bali jauh terbelakang dibandingkan dengan kemajuan-kemajuan di Jawa.

Dibidang sosial ekonomi perkumpulan ini mengadakan usaha-usaha untuk memberikan penerangan kepada masyarakat untuk melakukan penghematan dan penyederhanaan dalam upacara-upacara keagamaan, khususnya dalam upacara pembakaran mayat (*ngaben*). Di samping itu, untuk memajukan perekonomian perkumpulan Surya Kanta juga berusaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang koperasi sehingga sejak saat itu di bebeapa *banjar* (kampung) mulai bermunculan perkumpulan-perkumpulan kopeasi. Ide-ide pembaharuan yang selalu dikumandangkan lewat majalah *Suraya Kanta* adalah menuntut kesamaan hak antara golongan Triwangsa dengan golongan Jaba dalam bidang perlakuan dan hukum, serta meminta kepada pemerintah mulai mengadakan penilaian terhadap orang-orang yang akan diangkat menjadi pegawai maupun kepala pemerintahan dengan ukuran tingkat kepandaian (pen-

didikan) dan bukan berdasarkan atas keturunan atau peringkatan kasta.

Perkumpulan Surya Kanta sebagai suatu organisasi yang sudah modern, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tanggal 21 Maret 1926 dapat dibentuk pengurus cabang Singaraja: Nyoman Gelgel, wakil presiden: Wayan Mas Wiryasuta, sekretaris: Wayan Mudrakarsa, bendahara: Putu Ruma dan komisaris: Ketut Katon.³⁹

Dalam tahun 1926. perkumpulan Suraya Kanta dapat membuka cabang-cabangnya di Bali Selatan yaitu di distrik Bajra, Tabanan. Dalam hubungannya dengan penyebarluasan ide pembaharuan atau paham kemajuan di seluruh Bali, telah dapat dibentuk agen majalah *Surya Kanta* di Denpasar, Tabanan, Bangli, Gianyar, Jembrana dan Karangasem.

2.7.4 *Partai Indonesia Raya.*

Semakin majunya perkembangan pendidikan di Bali semakin kuat kesadaran masyarakat terhadap persatuan, sehingga muncullah sebuah organisasi politik. Organisasi ini mula-mula muncul di Negara atas perakarsa seorang dokter yaitu dr. Murjani, kemudian antara tahun 1938—1939 sudah membuka cabang-cabangnya di Singaraja, Tanann, Denpasar, Klunkung, Gianyar, Bangli dan Karangasem. Partai Indoesia Raya (Parindra) merupakan partai yang pertama di Bali yang menanamkan rasa kebangsaan pada rakyat Bali. Situasi di Bali yang cukup keras dari pihak pemerintah kolonial, menyebabkan Parindra mengambil politik kerja-sama (koperasi).⁴⁰

CATATAN BAB II

1. C.J. Grader, *Nota van toeliechtingen betreffende het in te stellen Zelfbesturend Landschap Boeileng.* (tampa tahun), hal. 59–60.
2. Lihat lampiran pada peta kota Singaraja pada tahun 1962 yang disesuaikan dengan peta tahun 1956.
3. C.J. Grader, *Nota van toeliechtingen. op. cit.* hal. 51.
4. Konsep kasta berdasarkan fungsi dalam masyarakat menurut agama HIndu, sudah cukup tua dan sudah disebutkan dalam kitab Rig Weda. Lihat Louis Dumont, *Homo Hirarchicus : The Caste System and its Implication.* London: Paladin, 1972. hal. 107; Cf. I Njoman Kadjeng (cs.), *Sarasamuccaya.* (1975), hal. 34–35.
5. Hildred Geertz and Clifford Geertz, *Kinship in Bali.* Chicago: The University of Chicago Press, 1975, hal. 41–82, 170–171; sebagai analisa lihat G.P. Murdock, *Social Structure.* New York: The Free Press, 1965, hal. 91–112.
6. Menurut konsep *Brahmokta Widi Sastra dan Sarasamuccaya*, namun pada kenyataannya pembagian tugas di dalam masyarakat Bali tersebut di atas tidak setajam dan setegas itu.

7. Sebagai referensi lihat kitab *Agama* (1909), *Adi Gama* (1909); lihat juga V.E. Korn, *Het Adatrecht van Bali* (1932), hal. 165; cf. C.Tj. Bertling, *Pendeta Tanah Indonesia*. (1974), hal. 11–12.
8. Lihat Gert and Mills, *From Max Weber: Essays in Sociology*. (1958), hal. 159.
9. Aturan-aturan (*dresta*) semacam itu termuat dalam lontar *Widipapincatan*. (manuskrip).
10. C. J. Grader, *Nota van toelichtingen*, *loc. cit.*
11. Salah satu bentuk *sima*, lihat Lieferinck, *Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten*. ('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921), hal. 258–369.
12. I Gst. Gde Raka, *Monografi Pulau Bali*. Djakarta : Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, 1955, hal. 22.
14. C.J. Grader, *Nota van toelichtingen*., *op. cit.* hal. 39.
15. A.K. Nielsen, *Leven en avonturen van een oostinjevaarder op Bali*. Amsterdam: 1928, hal. 49.
16. *Degh-Register*, C. no. 77. Lihat Lekkerkerker, *Bali en Lombok : Oversziencht der literatuur omtrent deze eilanden tot einde 1919*, hal. 291.
17. C. Lekkerkerker, "Het voorspel der vestiging van den Nederlandsche macht op Bali en Lombok". *BKI*, 29, tah. 1923. hal. 199, 202–203.
18. *Ibid.* hal. 212.
19. E. Utrecht, *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Sumur Bandung, 1962, hal. 119–121.
20. C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*. Leiden : 1933, hal. 407–408.
21. V. E. Korn, *Het Adatrecht van Bali*. (1932), hal. 440–441. cf. Lekkerkerker, *Het Voorspel*.*op. cit.* hal. 201.
22. Utrecht, *Hukum Internasional*., *op. cit.* hal. 122.
23. Lekkerkerker, "het Voorspel.*Ibid.*
24. G.F. de Bruyn Kops, *Nota van Overgave van het Bestuur over de Residentie Bali en Lombok*. (1909), hal. 13.

25. V. E. Korn, "Balische Decentralisatie". *Koloniale Studien*. No. 2, 10de Jaargang, April 1926, hal. 180.
26. H.J. Moll. *Memorie van Overgave van den Aftredend Resident van Bali en Lombok*. 24 Mei 1941, hal. 51-52.
27. Baca "Sedikit tentang Zelfbestuur di Bali". *Djatajoe*, no. 1, Agustus 1941, hal. 29-33.
28. I Gde Panetja, "Pengadilan di Bali". *Bhawanagara*, no. 8 Januari 1935, hal. 113-117.
29. Garsa, "Pengadilan di Bali dan Lombok". *Bhawanagara*, no. 9, Februari 1932, hal. 141; dan *Bhawanagara* no. 11, April 1932, hal. 166-172.
30. Lihat artikel "Poelau Bali akan kembali menjadi Bali". *Bali Adnjana*, no. 19 Agustus 1929, hal. 1-4.
31. Mengenai pertautan Tuan-Hamba, lihat Eric R. Wolf. "Kinship, Friendship and Patron-Client Relation in Complex Societies" dalam Michael Baton (ed), *The Social Antropology of Complex Societies*. London: Tavistock Publication, 1973, hal. 1-20.
32. G.T. de Bruyn Kops, *Kota van Overgave*., *op. cit.* hal. 16-17; hal. 107-108.
33. L. U. van Stenis, *Memorie van Overgave van het Gewest Bali en Lombok*. April 1919, hal. 117-118.
34. P.E. Moolenburg, *Memorie van Overgave van het Gewest Bali en Lombok*. September 1926, hal. 79-81.
35. Data ini diambil dari L.J.J. Caron, *Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok*. Agustus 1929, hal. 94-97.
36. H. J. E. Moll, *Memorie van Overgave van den aftredend Resident van Bali en Lombok*. 1941, hal. 71-76.
37. *Surya Kanta*. no. 8, Agustus 1926, hal. 98-99; cf. Njoman Mas Wirjasutha, "Penjakitnja Perkoempoelan di Bali". *Djatajoe*, no. 6, Januari 1939, hal. 176.
38. Lihat Statuten *Surya kanta* dalam *Surya Kanta*, no. 2, November 1925, hal. 16.

39. "Verslag Opembare Algemeene Vergadering Surya Kanta di Singaraja". *Surya Kanta*, no. 4, April 1926, hal. 60-63.
40. Lihat Njoman S. Pendit, *Bali Berdjung*. Denpasar: Jajaran Kebaktian Pejuang Daerah Bali, 1954, hal. xxiv-xxv.

BAB III SINGARAJA PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

3.1 *Sistem Pemerintahan*

Pendudukan Jepang di Indonesia khususnya di Bali merupakan peristiwa yang berproses cukup cepat. Jepang menyusun rencananya untuk pendaratannya di seluruh Hindia Belanda (Indonesia) dari Pilipina melalui daerah Sulawesi dan terus memasuki perairan Bali.¹ Di Pulau Bali pendudukan Jepang dilakukan oleh Angkatan Lautnya, mula-mula mendarat di wilayah Bali Selatan, kemudian baru menyebar ke seluruh Bali bahkan akhirnya kota Singaraja dijadikan pusat pemerintahan sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya. Sesudah situasi agak tenang, mulailah pemerintah Jepang mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik pemerintahan Jepang yang bercorak militer.

Bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan Belanda, tidaklah banyak mengalami perubahan karena pemerintah Jepang masih juga mengakui dan mempergunakan struktur pemerintahan tradisional. Raja sebagai penguasa tradisional tetap diberikan wewenang untuk mengurus rakyatnya atas pengawasan pemerintah Jepang. Demikian juga penguasa-penguasa di bawah raja seperti punggawa, perbekel dan klian tetap diakui kekuasaannya atas luas daerah tertentu untuk menstabilkan keadaan. Pemerintah Jepang mengharapkan bahwa dengan

menggunakan struktur pemerintahan tradisional, maka raja-raja di seluruh Bali akan dapat membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya.

Setelah keadaan pulih kembali, penduduk yang dahulu ketakutan sudah pulang kembali ke kampung halamannya dan dapat bekerja ke sawah maupun ke ladang masing-masing dengan tenang, mulailah pemerintahan Jepang mengatur sistem pemerintahan bersama-sama dengan penguasa pribumi. Sistem pemerintahan Jepang di Bali dijalankan dengan sistem *indirect-rule*, dari penguasa Jepang adalah terdiri dari militer Angkatan Laut, sedangkan pemerintahan sipil diambil dari penguasa pribumi. Pusat pemerintahan di tempatkan di Kota Singaraja, yang sebelumnya merupakan ibu-kota Keresidenan Sunda Kecil. Adapun struktur pemerintahan Jepang susunannya sebagai berikut :

Pemerintahan yang tertinggi disebut *Syo Sunda Minseibu* yang berpusat di Kota Singaraja, pemerintahannya disebut *minseibu* yang dikepalai oleh *choo kan*. Di bawah *Minseibu* adalah *Nambu Balien*, berpusat di Denpasar yang dikepalai oleh *ken kan rin kan*. Di bawah *nambu* adalah *syu* yang aritnya sama dengan kerajaan yang pusat pemerintahannya di masing-masing kerjaan, kepala pemerintahannya disebut *syu cho* artinya raja pribumi, yang didampingi oleh seorang pejabat Jepang yang disebut *bun ken kan rin kan*.

Pemerintahan yang setingkat dengan distrik atau kecamatan disebut *gun*, dikepalai oleh seorang Punggawa dalam istilah Jepang disebut *gun cho*.

Pemerintahan yang paling bawah yaitu di tingkat kepala desa atau PERbekel adalah *son cho*. Dengan demikian jelaslah bahwa struktur pemerintahan tradisional masih dipergunakan pada masa pemerintahan Jepang hanya diganti dengan istilah-istilah bahasa Jepang. Struktur pemerintahan seperti tersebut di atas akan jauh mempermudah komunikasi antara pemimpin

dengan rakyat, lebih-lebih nantinya akan berfungsi sebagai alat propaganda Jepang.

Sistem pemerintahan Jepang yang bersifat militer itu sudah jelas mencerminkan aturan-aturan yang bersifat keras dan menghendaki disiplin yang tinggi. Berbagai aturan yang harus ditaati seperti upacara-upacara yang diharuskan seperti penghormatan bendera, penghormatan dari jauh kepada Tenno Heika dan disusul dengan mengheningkan cipta. Keharusan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* bagi setiap orang terutama bagi pelajar dan para pegawai. Sejak mulai diterapkannya sistem pemerintahan, nama-nama gedung, lagu-lagu Jepang dan termasuk pelajaran bahasa dan huruf Jepang mulai diajarkan di sekolah-sekolah.

Upacara yang bersifat rutin adalah upacara yang dilakukan pada tiap-tiap tanggal 8 yang dilakukan serentak dari tingkat kota atau kerajaan sampai di tingkat desa, diikuti oleh semua lapisan masyarakat seperti pelajar, pegawai, organisasi-organisasi dan rakyat.²

Dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan, berbagai usaha yang dilakukan dalam menjamin keamanan dan kepentingan politik Jepang pada saat itu, di Bali dibentuk bidang kemeliteran yang dipersiapkan untuk tenaga bantuan dalam perang Asia Timur Raya. Kesatuan militer ini disebut PETA singkatan dari Pembela Tanah Air. Untuk persiapan, diadakan latihan-latihan bertempat Banumala, Singaraja. Sesudah selesai mengikuti latihan fisik, kemudian dibentuk tiga batalyon atau *daidam*. Di Bali, pemerintah Jepang membuat tiga Daidan, masing-masing terletak di Negara sebagai Daidan I, di Kediri Tambanan sebagai dairan II dan di Gunaksa, Klungkung sebagai Daidan III.

Jelaslah bahwa pemerintahan Jepang itu bersifat militer. Pemerintahan militer Jepang di Bali dibawah Angkatan Laut yang membawahi wilayah meliputi Bali dan Lombok. Untuk pemerintahan di Bali dibagi menjadi dua wilayah, yaitu *Hokubu*

Bali Ken atau Bali Utara meliputi Wilayah Buleleng dan Jembrana, dengan pusat pemerintahannya di Kota Singaraja, dan yang satu lagi yaitu Nanbu Bali Ken atau Bali Selatan berkedudukan di Denpasar yang meliputi wilayah Tabanan, Badung, Gianyar, Bangil, Klungkung dan Karangasem.

3.2 *Kehidupan Sosial Ekonomi*

Kehidupan sosial ekonomi pada masa pemerintahan Jepang mempengaruhi sekali kehidupan sosial-ekonomi seluruh lapisan masyarakat di Bali, termasuk juga masyarakat Kota Singaraja. Semua aktivitas masyarakat semata-mata ditujukan pada kepentingan pemerintah Jepang yaitu untuk perlengkapan dan persediaan perang. Situasi pemerintahan militer Jepang menyebabkan rakyat merasa takut sehingga suasana menjadi sepi.

Tanah pertanian sebagian besar ditanami tanaman untuk kepentingan perang, semua hasil padi, jagung lebih banyak untuk persediaan perang, sedang tanah-tanah kosong dan tanah pekarangan semuanya ditanami kapas dan pohon jarak. Tidak mengherankan kalau perekonomian menjadi lesu. Pasar-pasar dan toko-toko tidak begitu ramai, pelabuhan juga sepi, karena orang-orang tidak banyak berpergian.

Kota Singaraja yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan Belanda dan juga menjadi kota perdagangan, sesudah pendudukan Jepang menjadi lebih sunyi dan sepi. Lalu-lintas perdagangan tidak seramai dahulu karena pada masa pemerintahan Jepang, pengiriman hewan keluar Bali tidak dimungkinkan lagi. Semua pengiriman hewan keluar Bali dijaga dengan ketat, karena pemerintahan Jepang sendiri telah mengadakan beberapa usaha antara lain *Taiwan Chikusan* adalah usaha pemotongan ternak, pengawetan daging dan penyamakan kulit. Beberapa usaha lainnya seperti *Mitsui Busana Kaisha* adalah usaha pengumpulan padi dengan alat penggilingan yang masih sederhana, perusahaan *Nitsui Norin* adalah usaha pengumpulan dan pemintalan kapas, *Gosiho* merupakan usaha

pembuatan goni. Hampir semua kehidupan sosial ekonomi di delapan kabupaten (pada masa Jepang masih berbentuk kerajaan) di Bali mengalami nasib dan tingkat kehidupan yang sama, karena seluruh perhatian pemerintah Jepang hanya untuk kepentingan perang dan kemenangan Asia Timur Raya. Untuk menanamkan kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan dan kekuatan Jepang, muncullah selogan-selogan antara lain apa yang dikenal dengan sebutan "Tiga A" yaitu : Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.

Gerakan yang dikenal dengan "Tiga A" ini hanya semata-mata bertujuan untuk menanamkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah Jepang, ingin menarik hati rakyat bahwa Jepang merupakan pelindung, merupakan "Saudara Tua" dari Bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan lagi kesetiaan rakyat, dibentuklah badan propaganda yang diberi nama *Sendebu-Sendenka* dan *Naimobu* yang khusus didirikan untuk menggugah hati rakyat Bali agar mau bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, demi untuk kemenangan Asia Timur Raya. Inilah yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah Jepang ke seluruh pelosok, dari kota sampai ke desa-desa.⁴

Dalam usaha meningkatkan kemakmuran, rakyat diharuskan bekerja keras, baik dalam sektor pertanian, perkebunan, memperbaiki jalan, bergotong-royong menanam jarak dan kapa, sedangkan dipihak lain, balatentara Jepang bertugas di bidang kemeliteran.⁵ Salah satu usaha Pemerintah Jepang yang berkecimpung dalam usaha mencari dana untuk kepentingan pemerintah ialah dibentuknya suatu badan yang disebut Badan Pembantu Peta di Bali yang susunan pengurusnya sebagai berikut :

1. *Sosa* (pelindung tertinggi): *Minseibu Tyokan*
2. *Tyuo Hanbutyo* (ketua badan pusat) : *Keizaibutyo*
3. *Fuku Tyou Hanbutyo* (ketua badan pusat muda) : *Seimukatyo*
4. *Komon* : *Minseibu Ketyo*

Tyou Hanbu Rizi (Pengurus badan pusat), terdiri atas :

1. I Gusti Gede Dlantik
2. Ida Bagus Mantra
3. Raden Katung Wirjomidjojo
4. Ktut Suberata
5. I Gustu Ngurah Wayan
6. I Made Oka
7. I Putu Gede
8. Ida Bagus Ketut Rurus
9. Go Sien Tjong
10. I Gusti Made Djlantik Dirga
11. Lalu Abdulrahman
12. Lalu Serinata
13. Mami Fadelah
14. N. Idris
15. Abdul Wahab
16. Mr. I Gusti Ktut Pudja
17. I Made Mandra
18. I Gde Ratep
19. I Gusti Nyoman Sirya
20. dr. Panut Hadiwidjojo
21. I Nyoman Rai
22. Tan Swie Lian
23. Nazar Ali Balbeid Arab, Denpasar
24. dr. Soekardjo Mangunsudiro, Kepala Rumah Sakit Bangli.

Zimukyoku (Kantor Badan Pusat) :

ZImukyokutyō (kepala kantor) I Nyoman Kadjeng (*seimuka*).

- a. *Syomukaikeikakarityō* (kepala bagian urusan umum dan keuangan : I Wayan Badra (*toshokan*)).
- b. *Keihatsu sendenkakarityō* (kepala bagian urusan penerangan dan penganjur semangat) : Ida Bagus PUTra Manuaba (*chugakko no sensei*).
- c. *Engokakarityō* (kepala bagian urusan tunjangan dan hiburan) : I Nyoman Kadjeng (*seimuka*).

3.3 *Pendidikan*

Sistem pendidikan pada masa pemerintahan Jepang sangat dipengaruhi oleh semangat militer Jepang, terutama di Kota Singaraja sebagai ibukota Propinsi Sunda Kecil, *Syo Sunda Minseibu* yang dikepalai oleh *choo kan*. Sebagai ibukota propinsi sudah jelas bahwa Singaraja disamping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pendidikan. Dilihat dari jumlah sekolah-sekolah tidaklah banyak kemajuan dibandingkan sebelumnya, namun yang paling menonjol adalah sistem pendidikan yang dijiwai oleh semangat militer Jepang. Dalam bidang pendidikan juga tampak adanya "penjepangan" atau Japanisasi, ini kita bisa lihat dalam pelajaran huruf Jepang di kalangan murid-murid sekolah Dasar seperti huruf Katakana dan Hirahana bahkan sampai pada huruf Kanji. Di sekolah-sekolah diajarkan lagu-lagu Jepang, baris-berbaris, senam atau *taizo*, penghormatan upacara dan penanaman disiplin yang kuat.

Salah satu badan yang ikut berperan dalam bidang pendidikan adalah *Seram Minseibu* yang juga berkedudukan di Kota Singaraja yang bertugas memberi petunjuk kepada anak-anak sekolah dan pemuda untuk menanamkan semangat cinta dan membela tanah air serta untuk kepentingan Asia Timur Raya.⁶

Beberapa sekolah yang ada di Kota Singaraja adalah tingkat Sekolah Dasar yang hampir ada di tiap kecamatan, sedangkan tingkat Sekolah Menengah hanya ada di Kota Singaraja dan ada juga terdapat di Kota Denpasar. Sekolah menengah yang ada di Kota Singaraja adalah *Hutsu Chu Gakko* (Sekolah Menengah Umum), *Katto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Atas), *Kyo In Yo Seido* (Sekolah Guru Desa), *Sihan Gakko* (Sekolah Guru B), *Katto Sihan Gakko* (Sekolah Guru A), ada juga Sekolah Pertanian dan Sekolah Pertukangan.⁷

3.4 *Organisasi Sosial*

Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan mempunyai peranan yang penting juga dalam menyebar-luaskan propaganda-propaganda yang membangkitkan semangat persatuan di mana

bangsa Jepang menampilkan dirinya sebagai bangsa pelopor di Asia. Untuk usaha-usaha ini di Kota Singaraja lahir suatu wadah yang menampung kegiatan para pemuda yang dikenal dengan gerakan "Tiga A" yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia.⁷

Setelah terbentuknya gerakan Tiga A, kemudian menyusul berdiri barisan propaganda yang diberi nama *Sendenbu Sendenka* dan *Naimobu* yang bertugas memperopagandakan semangat Jepang sebagai pemimpin Asia dan *Dai Nippon* pasti menang melawan tentara sekutu. Barisan propaganda ini tidak hanya bergerak di Kota Singaraja tetapi ke seluruh pelosok pulau Bali.

Salah satu organisasi yang penting pada masa pendudukan Jepang adalah Pembela Tanah Air (PETA). Organisasi ini berdiri sejak diumumkannya pembentukan pasukan sukarela oleh *Saikoo Sokikan* pada tanggal 3 Oktober 1943 dan di Bali baru diumumkan pada permulaan tahun 1944. Sebagai ibu kota propinsi, Kota Singaraja dijadikan tempat latihan bagi perwiraperwira bertempat di tangsi Banyumala, dimulai pada tanggal 15 Maret 1944. Setelah selesai mereka ditempatkan di empat *daidan* (batalyon) di Bali yaitu di Negara, Kediri Tabanan, dan Guraksa di Klungkung. *Daidan* Negara membawahi wilayah Jembrana dan Buleleng, *Daidan* Kediri mempunyai wilayah Tabanan dan Badung dan *Daida* Gunaksa mempunyai wilayah Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem.

Untuk menjaga keamanan masyarakat baik di kota-kota sampai di desa-desa dibentuk suatu organisasi yang diberi nama *Sainendan*.

Pada bulan Juli 1944 pemerintah militer Jepang di Bali mengerahkan pemuda di tiap Kabupaten untuk menjadi tenaga sukarela yang diberi nama Barisan Pekerja Sukarela Bali (BPSB). Para tenaga sukarela ini yang tergabung dalam BPSB diperlukan tenaganya untuk membuka tanah baru di daerah Sulawesi, Kalimantan. Sebelum berangkat mereka semua berkumpul di Kota Singaraja sehingga pada waktu itu Kota Singaraja dapat dikata-

kan sebagai kota penampungan *romusha* karena pengiriman romusha ke luar bali melalui pelabuhan Buléng.

Organisasi sosial yang khusus bagi kaum wanita adalah *Fujinkai*. Perkumpulan ini tidak hanya terdapat di Kota Singaraja tetapi ada diseluruh kota-kota di Bali. Kedudukan fujiangkai sebagai satu-satunya organisasi wanita memang banyak peranannya terutama untuk ikut mensukseskan perang Asia Timur Raya serta memajukan masyarakat wanita di Bali. Usaha-usaha untuk memajukan masyarakat antara lain ikut membantu di bidang pendidikan yang membuka kursus-kursus yang sudah mulai dikenal dengan istilah Pemberantasan Buta Huruf (PBH), bergerak di bidang kerajinan tangan seperti pemintalan benang, memelihara ulat sutra, menenun kain, ikut menanam kapas dan pohon jarak di halaman rumah masing-masing.

CATATAN BAB III

1. Awwyong (et. al), *Perang Pasifik, 1941–1945*. Djakarta : Kengpo, 1960, hal. 7.
2. Beberapa aturan pemerintahan Jepang lihat *Karangasem Bunken Kanrikan Jimusyu*. Karangasem: Bunken Karrikan, 14 Djuichigatsu, 2603, no. 1067, (naskah).
3. Soebekti, *Sketsa Revolusi Indonesia, 1940–1945*. Surabaya: Grip, 1966, hal. 35
4. Njoman S. Pendit *Bali Berjuang*. Jakarta : Gunung Agung, 1979.
5. *Karangasem Bunken K-nrikan Jimusyu*, *op. cit.* hal. 3
6. *Nasehat jang moelia Toean Tyokan*. Singaraja: 25 Itigatsu 2604 (naskah).
7. Tentang Gerakan "Tiga A" cf. Subekti, *Sketsa Revolusi Indonesia 1940–1945*. hal. 35.

BAB IV SINGARAJA PADA MASA SESUDAH KEMERDEKAAN

4.1 *Sistem Pemerintahan*

Kedatangan Mr. I Gusti Ketut Pudja pada tanggal 23 Agustus 1945 dari Jakarta sebagai gubernur Sunda Kecil segera membentuk pemerintahan Propinsi Sunda Kecil bersama-sama dengan Ida Bagus Putra Manuaba selaku ketua Komite Nasional Inodnesia (KNI). Pusat pemerintahan ditetapkan di Singaraja sebagai ibukota Propinsi Sunda Kecil.

Dari tahun 1945 sampai tahun 1950 pemeintahan di daerah Bali masih berbentuk swapraja yang masing-masing daerah dikepalai oleh seorang raja. Swapraja Buleleng pada periode itu yang menjadi raja adalah Anak Agung Nyoman Pandji Tisna. Seperti kita maklumi bersama bahwa periode 1945–1949 di Bali sedang mengalami revolusi fisik, sehingga dalam bidang pemerintahan tidak banyak kita dapati perubahan. Yang penting adalah pada waktu dilaksanakan konprensi Denpasar 1946 telah melahirkan Negara Indonesia Timur, situasi di Kota Singaraja selama revolusi fisik boleh dikatakan sepi, karena Bali Utara termasuk Kota Singaraja dijadikan basis perlawanan dan basis gerilya. Pusat pemerintahan pada waktu itu masih tetap di Singaraja.¹

Struktur pemerintahan masih tetap seperti struktur pemerintahan sebelumnya. Kepala pemerintahan di Singaraja dipegang oleh seorang raja, dibawahnya terdiri dari para *punggawa* yang memegang pemerintahan pada tingkat *distrik*, seorang *punggawa* membawahi beberapa daerah perbekelan yang dikepalai oleh seorang *perbekel*, dibawah perbekel adalah *Klian dinas* dan *klian adat*. Pemilihan masing-masing kepala daerahnya diadakan dengan musyawarah dengan persetujuan atasannya, atau mendapat persetujuan raja.

Sebagai masyarakat kota, nanti akan tampak dalam kehidupan ekonomi maupun dalam interaksi sosial, karena keunikan dari masyarakat Kota Singaraja adalah di samping sebagai kota pemerintahan juga sebagai kota pelabuhan.

4.2 *Kehidupan Ekonomi*

Seperti telah disinggung di atas bahwa Kota Singaraja di samping sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai kota pelabuhan. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat kota. Segala jenis barang-barang ekspor dari Bali menuju daerah-daerah di luar Bali pengirimannya melalui pelabuhan Buleleng di samping pelabuhan Gilimanuk di bagian Barat, Pelabuhan Benoa di Bali Selatan dan pelabuhan Padang Bai untuk bagian timur. Adapun jenis barang-barang yang di ekspor keluar Bali yang terpenting adalah jenis hewan berupa sapi, babi yang dikirim ke Jakarta dan Singapura. Demikian juga pengiriman kerbau ke luar negeri terutama Singapura pengirimannya melalui pelabuhan Buleleng.²

Hasil perkebunan yang sangat penting dalam hubungannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat Kota Singaraja adalah perkebunan kopi. Petani kopi sudah mengontrakkan kebun kopinya kepada pedagang-pedagang kopi yang umumnya orang Tionghoa.

KONTRAK YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1951³

Macam kopi	Mengambil uang	Kopi yang diserahkan	Harga kopi di pasar bebas waktu penyerahan
Arabica	Rp. 225,- Rp. 337,50	1 qt.	Rp. 500,- Rp. 510,-
Robusta	Rp. 187,50 Rp. 262,50	1 qt.	Rp. 600,- Rp. 615,-

Selain jenis tanaman kopi sebagai hasil perkebunan di pegunungan Munduk dan sekitarnya yang terletak di wilayah Buleleng, demikian juga di Pegunungan Pupuan termasuk wilayah Tabanan semuanya berhubungan erat dengan orang-orang Tionghoa di Kota Singaraja, masih ada beberapa jenis tanaman yang dieksport yaitu Jeruk dari daerah Buleleng bagian bagian timur dan Karangasem, gula aren, salak dan kopra dari daerah Karangasem.

Berdasarkan catatan tahun 1952, jenis-jenis jeruk yang dikirim ke Jakarta dan Singapura melalui Pelabuhan Buleleng antara lain : jeruk keprok (1082,194 ton) jeruk bali (36,741 ton) dan jeruk manis (51,281 ton).

Keadaan lalu-lintas perdagangan, baik melalui darat maupun perdagangan laut sedikit banyak ikut mewarnai kehidupan ekonomi Kota Singaraja. Situasi Kota Singaraja pada umumnya lebih ramai dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Bali, terutama karena dekat dengan pelabuhan sehingga banyak toko-toko pusat perbelanjaan.

Pedagang-pedagang kelontong pada umumnya dikuasai oleh pedagang Timur Asing terutama orang Tionghoa dan Arab. Penduduk suku lain seperti orang Jawa, Madura, Bugis dan orang Sasak kebanyakan mereka sebagai pedagang kecil atau pedagang penyalur bahan makanan, ikan, gula dan sebagainya sedangkan orang Bali kebanyakan sebagai pedagang beras, gula kelapa dan buah-buahan. Di samping sebagai pedagang mereka kebanyakan juga menjadi buruh pelabuhan. Mereka sengaja datang untuk mencari kehidupan baru di kota.

Perkembangan kota dapat juga dipengaruhi oleh adanya beberapa pabrik maupun perindustrian. Berdasarkan sumber tahun 1955 di Kota Singaraja dapat diketahui beberapa jenis perusahaan dan beberapa pabrik sudah mulai berdiri antara lain pabrik es, pabrik minyak kelapa, pabrik kecap, pabrik penyamakan kulit dan perusahaan sepatu. Dengan majunya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, timbul juga perusahaan yang bergerak dibidang bangunan seperti pemborong bangunan, perusahaan beton dan tegel, perusahaan mebel dan juga perusahaan sabun. Di samping itu masih ada yang bergerak di bidang angkutan laut.

4.3 *Mobilitas Sosial*

Berbicara masalah mobilitas sosial yang terjadi di Kota Singaraja pada periode sesudah kemerdekaan sampai tahun 1954 boleh dikatakan belum ada sumber lengkap untuk dapat dijadikan pegangan dalam menjelaskan perkembangan penduduk di Kota Singaraja. Namun bila kita lihat dari beberapa segi, seperti perkembangan pemerintahan, perkembangan ekonomi termasuk perdagangan, kemudian dihubungkan dengan perkembangan sekolah-sekolah di Singaraja maka dapat kita tarik suatu analisa, bagaimanapun juga gaya tarik suatu kota, lebih-lebih sebagai ibu kota propinsi sedikit banyak memberikan tarikan sebagai suatu proses urbanisasi.

Perpindahan penduduk dari desa ke Kota Singaraja memang sudah lama berproses, terutama sejak dijadikannya Kota Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok pada masa penjajahan Belanda.

Pada masa sesudah kemerdekaan terutama periode revolusi fisik, 1945-1949 keadaan Kota Singaraja kelihatan sepi, sebagian penduduk kota terutama para pemuda yang tergabung dalam pasukan grilya banyak yang meninggalkan kampung halamannya pergi ke hutan. Baru kemudian sesudah penyerahan kedaulatan yaitu sesudah tahun "limapuluhan" orang-orang

mulai kembali mencari pekerjaan dengan tenang dan situasi Kota Singaraja mulai semakin ramai. Sekolah-sekolah mulai dibuka, perdagangan mulai lancar sehingga pelabuhan Buleleng kelihatan semakin hidup.

Pemusatan dari tempat-tempat bangunan perkantoran dan pusat-pusat pertokoan menyebabkan Kota Singaraja seolah-olah dibagi dua bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah, karena dari sudut geografis situasi kota miring, yaitu semakin meninggi dari permukaan laut.⁴

Pada bagian atas, merupakan daerah pusat pemerintahan dan sekolah-sekolah, sedang bagian bawah adalah daerah pelabuhan yang dikenal dengan Pabean Buleleng.⁵ Dari pembagian dua daerah pusat kegiatan ini akan tampak kepada kita bahwa kedua daerah ini merupakan tempat permukaan sebagian besar para pendatang apakah mereka sebagai pegawai, guru atau sebagai pedagang.

Dalam membicarakan mobilitas sosial ini tidak lepas dari masalah urbanisasi. Beberapa faktor yang memungkinkan timbulnya urbanisasi di Kota Singaraja adalah sejak mulai berkembangnya perdagangan, munculnya toko-toko, firma-firma yang bergerak di bidang ekspor hewan dan hasil bumi dan meluasnya pendidikan serta semakin majunya urusan-urusan administrasi pemerintahan. Ini semuanya merupakan faktor pendorong untuk datangnya orang-orang yang mencari bidang pekerjaan yang semuanya berpusat di Kota Singaraja.

4.4 *Interaksi Sosial.*

Hubungan antar suku bangsa di Kota Singaraja sesudah kemerdekaan, berbeda dengan situasi pada masa kolonial Belanda. Pada masa sesudah kemerdekaan status sosial orang Bali dengan suku lainnya boleh dikatakan sudah tidak ada perbedaan lagi di dalam masyarakat. Penaruh perjuangan kemerdekaan terutama dalam revolusi fisik yang berlangsung di Bali Utara, menyebabkan hubungan antar suku semakin erat, terutama kontak-kontak dengan pulau Jawa.

Dilihat dari latar belakang sejarah, demikian juga dari faktor geografis memang sangat memungkinkan Kota Singaraja mengadakan kontak-kontak dengan daerah di luar Bali. Kontak-kontak melalui dunia perdagangan memang sudah dilakukan sejak 18 sebagai kota transito antara Sulawesi, Bali dan Jakarta, di samping perdagangan interinsuler antara Bali dengan Jawa dan pulau-pulau di sebelah timur Bali. Sejak itu Kota Singaraja mulai terbuka bagi perdagangan-pedagang yang akhirnya ada yang menetap di Bali, sehingga sampai sekarang masih kita dapatkan perkampungan orang-orang Bugis, Madura, Sasak, dan Jawa, di samping orang-orang Timur Asing seperti orang-orang Tionghoa dan orang Arab maupun orang Keling (India).

Interaksi sosial di antara orang-orang Bali dan orang bukan Bali kebanyakan berkisar pada soal perdagangan. Umumnya diantara mereka sudah memiliki suatu perkumpulan gotongroyong terutama tampak pada waktu ada upacara kematian maupun upacara perkawinan. Sistem perkampungan sebagai suatu sistem dalam pengelompokan sosial menyebabkan hubungan antar kampung seolah-olah tertutup, hal ini disebabkan adanya perbedaan agama.

Pada umumnya hubungan antar suku itu berlangsung dalam satu pekerjaan seperti misalnya dalam satu kantor pemerintah atau dalam kelompok pedagang, nelayan dan sebagainya. Jelaslah bahwa interaksi sosial diantara berbagai suku di Kota Singaraja itu lebih banyak dalam hubungannya dengan masalah ekonomi. Walaupun di antara mereka ada perbedaan agama dan latar belakang kebudayaan daerah seperti misalnya penggunaan bahasa daerah, namun hubungan di antara mereka tetap baik, tidak pernah terjadi konflik sosial. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, dipergunakan bahasa Bali. Oleh karena itu sudah tidak tampak perbedaan suku, namun hubungan di antara keluarga mereka masih ada yang mempergunakan

bahasa ibu seperti misalnya dalam kelompok keluarga Jawa, Madura dan pada kelompok orang Tionghoa.

4.5 *Pendidikan*

Sejak zaman kemerdekaan nama sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar yang dahulunya bernama Sekolah Rendah berubah namanya menjadi Sekolah Rakyat. Sampai tahun 1945 di Kabupaten Buleleng tercatat ada sebanyak 47 Sekolah Rakyat, kemudian pada tahun 1945 dapat didirikan tiga sekolah lagi yaitu di Kecamatan Sawah dan di Desa Sudaji didirikan Sekolah Rakyat No. 1 pada tanggal 9 April 1945, di Kecamatan Buleleng didirikan Sekolah Rakyat No. 1 Ketewel pada tanggal 17 April 1945, kemudian di Kecamatan Sukasada Sekolah Rakyat Pancasari didirikan pada tanggal 9 April 1945.⁶

Pada tahun 1946 situasi di Bali mulai memburuk karena mulai timbul konflik fisik antara tentara Belanda yang menduduki Pulau Bali dengan para pejuang kemerdekaan, sehingga perkembangan sekolah-sekolah di Bali sangat lambat sekali. Pada tahun itu hanya dapat didirikan tiga sekolah yaitu di Kecamatan Kubutambahan, Sekolah Rakyat Kayehan Pengalu didirikan pada tanggal 9 Desember 1946 di Kecamatan Buleleng yaitu Sekolah Rakyat Kalibukbuk berdiri pada tanggal 9 April 1946 dan di Kecamatan Seririt yaitu Sekolah Rakyat No. 1 Pengastulan didirikan pada tanggal 1 September 1946.

Keterbelakangan pendidikan di Bali pada masa Revolusi Fisik antara tahun 1945–1949 disebabkan karena kebanyakan para pejuang kemerdekaan yang menyingkir ke hutan sebagai gerilyawan terdiri dari kalangan guru, sehingga tidak jarang terjadi pembakaran sekolah karena pada masa perjuangan itu hampir semua komponen pendidikan ikut terlibat dalam perjuangan. Situasi yang demikian itu sudah jelas tidak memberikan situasi tenang belajar bagi anak-anak sekolah.

Dalam periode masa revolusi fisik, Kota Singaraja diduduki oleh tentara Belanda, di Bali pada periode itu termasuk dalam

Negara Indonesia Timur. Pada masa NIT ini perkembangan sekolah tidak begitu banyak. Selama periode 1946–1950 sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng hanya bertambah 4 buah itupun semuanya ada di luar Kota Singaraja.

Pada tahun 1947 hanya dibuka 2 sekolah yaitu Sekolah Rakyat Pacung di Kecamatan Tejakula dan Sekolah Rakyat No. 2 Banjar di Kecamatan Banjar. Pada tahun 1949 ada 2 buah sekolah lagi yang dibuka yaitu Sekolah Rakyat 1 Bebetin di Kecamatan Sawan dan Sekolah Rakyat Sidatapa di Kecamatan Banjar.⁷

Kurang majunya pendidikan di Bali antara tahun 1945–1950 hanya ada tiga Sekolah Menengah Pertama (Negeri) yaitu di Singaraja, Denpasar dan Klungkung. Pada tahun 1950 dibuka Sekolah Guru Bawah (SGB) di seluruh Kabupaten di Bali.

Pada tahun 1950 di Kota Singaraja dapat didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Guru Atas (SGA) Negeri, mulai saat itu Kota Singaraja berangsur angsur bertambah ramai, di samping situasi sudah mulai aman, sehingga situasi Kota Singaraja sudah mencerminkan situasi kota pelajar.

Satu-satunya Sekolah Menengah Swasta di Kota Singaraja yaitu SMP Bhaktiyasa berdiri pada tanggal 2 Agustus 1948 yang diprakarsai oleh Anak Agung Panji Tsina dan beberapa orang lainnya antara lain Nyoman Tirta yang pada waktu itu menjabat sebagai penilik Pendidikan Masyarakat Buleleng dan Wayan Ruma, guru SGB Singaraja. Berdirinya Sekolah Menengah Kengasaan ini didukung oleh pemerintah setempat dan dukungan masyarakat. Pada permulaan berdirinya SMP Bhaktiyasan dibantu juga oleh guru-guru yang mengajar di SMP Negeri.

Untuk menambah tenaga guru, dimana pada saat itu masih sulit untuk mendapatkan tenaga guru, oleh perguruan Bhaktiyasa diadakan usaha mendirikan Kursus Guru Bhaktiyasa pada tahun 1950 Pendidikan Kursus Guru Bhaktiyasa ini lamanya tiga tahun dan para pengajarannya diambil dari guru-guru SMP Bhaktiyasa yang sudah dianggap berwewenang dan ada ju-

ga dari luar sebagai tenaga ahli. Kursus ini hanya berlangsung satu angkatan, jumlah pesertanya ada sekitar 10 orang dan lulusan kursus itu hanya diperlukan untuk tenaga guru dilingkungan SMP Bhaktiyasa sendiri.

4.6 *Kegiatan Budaya*

Bila kita melihat kebudayaan Bali secara keseluruhan maka dapat kita bedakan antara corak kebudayaan Bali Utara dengan corak kebudayaan Bali Selatan. Perbedaan corak ini tampak lebih jelas dalam bidang kesenian, baik seni pahat maupun pada seni gamelan dan seni tari. Corak kesenian di Bali Utara mempunyai perawatan yang lebih "keras" dibandingkan dengan corak kesenian di Bali Selatan yang memiliki perwatakan yang lebih halus.

Pada periode revolusi fisik kehidupan atau kegiatan budaya di Kota Singaraja boleh dikatakan lesu. Hal ini disebabkan karena situasi gerilya dan masyarakat hampir seluruh kota dipihak perjuangan. Satu-satunya kegiatan yang tampak di kalangan pemuda pada saat itu adalah seni bela diri yaitu pencak silat yang sangat digemari oleh kalangan pemuda pada saat itu. Kegegaran pencak silat di Kota Singaraja sebenarnya sudah berlangsung lama yaitu sejak jaman pendudukan Jepang. Dalam situasi melawan penjajahan Belanda pencak silat ini hidup kembali di kalangan pemuda dalam mempersiapkan diri dan menambah keberanian. Hampir disegala pelosok kampung di Kota Singaraja tumbuh kegiatan pencak silat ini.

Sesudah keadaan mulai tenang kembali yaitu dimulai sekitar tahun 1950 beberapa kegiatan di bidang kerajinan mulai tumbuh. Di dua kota di Bali yaitu di Singaraja dan di Denpasar pada tahun 1950 mulai muncul kerajinan tenun. Kerajinan tenun ini sudah menjadi kerajinan rakyat Bali sejak dahulu terutama di beberapa tempat di sekitar Kota Singaraja seperti di Sukasada, Kubutambahan dan Tejakula, masyarakat disana sudah memiliki kepandaian menenun *kain songket*, kain yang

ditenun dengan benang emas yang memiliki harga yang cukup mahal. Adapula kerajinan tenun yang diaktifkan kembali pada tahun 1950 itu adalah kain tenun *endek* dari benang katun.

Di dalam kegiatan bidang kesenian, di Kota Singaraja dan sekitarnya memiliki kesenian tabuh dan tari yang cukup terkenal di seluruh Bali yaitu Sekehe Gong Banjar Paketan dan Sekehe Gong Jagaraga. Corak kesenian ini melahirkan apa yang dikenal dengan "Gong Kebyar" suatu pencerminan kesenian yang berwatak keras, lincah dan penuh kedinamisan.

Pada masa perjuangan antara tahun 1946–1950 di Kota Singaraja lahir kembali hiburan rakyat yang dikenal dengan *Joged Bumbung*. Kesenian ini hidup kembali bersamaan juga dengan hidupnya kesenian pencak silat, karena antara Joged Bumbung dan seni pencak dapat ditarikan bersama-sama. Joged Bumbung yang muncul jaman revolusi Fisik itu dapat juga dipakai sebagai sarana komunikasi oleh para pejuang yang sedang melakukan gerilya, mereka dapat juga menghibur diri pada malam hari sambil mengadakan komunikasi dengan masyarakat kota.

Salah satu kerajinan yang cukup terkenal sejak sebelum perang adalah kesenian kerajinan perak dan emas di desa Kamasan dan Bratan yang mempunyai corak hiasan tersendiri lain coraknya dengan corak Bali Selatan.⁸

CATATAN BAB IV

1. Lihat I Gusti Gde Raka, *Monografi Pulau Bali* Djakarta 1855, hal. 12–13; Lihat juga *Perinatan 1 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali* 1951.
2. Jumlah sapi tahun 1953 lihat I Gusti Gde Raka, *op. cit.* hal. 58–59.
3. *Ibid.* hal. 44
4. Lihat peta Kota Singaraja dan Pabean Buleleng, 1962
5. Lihat juga peta Kota Singaraja 1962 yang disesuaikan dengan keadaan tahun 1956
6. *Daftar Perkembangan Sekolah Dasar di Daerah Bali dari tahun ke tahun* 1977.
7. *Ibid.*
8. I Gusti Gde Raka, *op. cit.* hal. 75.

BAB V KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Perkembangan Kota Singaraja sebagai kota pemerintahan maupun sebagai kota perdagangan mengalami pasang surut sesuai dengan situasi politik yang ada di Pulau Bali maupun menyangkut situasi nasional.

Pada periode masa kolonial, perkembangan Kota Singaraja mulai tumbuh sebagai kota pemerintahan, hal ini disebabkan Kota Singaraja dipakai sebagai ibukota Keresidenan Bali dan Lombok. Sebagai ibukota, sudah tentu mendapat prioritas dalam fasilitas pembangunan, baik dalam pembangunan kantor-kantor administrasi maupun sarana jalan. Kedudukannya seperti itu memungkinkan Kota Singaraja berkembang menjadi kota yang paling maju di seluruh Bali.

Dalam kehidupan ekonomi, Kota Singaraja juga banyak mendapat pengaruh dari adanya Pelabuhan Buleleng yang terletak tidak begitu jauh dari ibukota. Jalur lalu lintas yang menghubungkan Kota Singaraja dengan Pelabuhan Buleleng menjadi ramai karena ada bangunan pertokoan sebagai pusat perbelanjaan, sehingga lalu lintas menjadi ramai

Kehidupan Kota Singaraja semakin hidup dengan dibukanya sekolah-sekolah. Hal ini juga memungkinkan untuk lahir-

nya organisasi-organisasi yang bersifat modern, sehingga Kota Singaraja dapat dikatakan sebagai pusat segala aktifitas baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan dan perdagangan. Kesemuanya adalah karena letak Kota Singaraja yang sangat strategis baik sebagai pusat perdagangan maupun sebagai pusat pemerintahan.

Pada periode revolusi fisik, keadaan Kota Singaraja semakin sepi, hal ini juga tidak terlepas oleh faktor politik pada waktu itu. Sesudah tahun 1950 keadaan politik baru mulai tenang, kehidupan Kota Singaraja bangun kembali sebagai kota pemerintahan maupun sebagai kota pelajar.

Sebagai kota pantai, masyarakat Kota Singaraja mempunyai corak tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Bali. Masyarakat yang majemuk mempunyai gaya tersendiri Hal ini tampak dalam pengelompokan mereka yaitu dalam wujud perkampungan Masyarakat kota pantai rupanya melahirkan juga corak kebudayaan tersendiri yang berlainan dengan masyarakat pedalaman, sehingga corak kesenian pun mempunyai corak yang agak "keras" sesuai dengan watak masyarakat pantai.

Lampiran 1

Tabel sekolah yang ada di Singaraja
sampai tahun 1919 ¹

Klasse school	H I S	Eropeesche Lagere school	H C S	Jumlah
2	1	1	1	4

Lampiran 2

Tabel sekolah yang ada di Buleleng
sampai dengan tahun 1929 ²

	Aantal der scholen op		Aantal der op					
	1 Oct 1926	1 Juni 1929	1 October 1926		1 Juni 1929			
			Aanwezige					
			Onderwijzers		Leerlingen		Onderwijzers	
		J	L		J	L	J	L
Eropeesche Lagere School	1	1	2	23	16	2	31	14
H I S	1	1	7	127	15	7	174	25
2e klasse school	8	8	28	758	28	31	1256	109
Volks scuolen	15	16	24	1029	41	33	1475	67

1. Dikutip dari *Memorie Van Overgave Van Het Gevest Bali in Lombok*, 1 April 1919, pp. 101-106.

2. Dikuti dari L.J.J. Cacron : *Memorie Van Overgave Van Hot Gevest Van Bali In Lombok*, Agustus, 1929.

Lampiran 3

Tabel sekolah yang di Singaraja
sampai dengan tahun 1932.¹

	Aantal der scholen op		Aantal der op					
	1 Oct 1929	1 Oct 1932	1 October 1929			1 October 1932		
			Onder wij zers	leerli- ngen		onder wij zers	leerli- ngen	
				j	m		j	m
Eropeesche Lagere School	1	1	2	36	18	2	19	10
H I S Tweede Klasse Scholen	1	1	7	174	36	8	172	44
Volks Scholen	8	8	29	928	95	27	1134	84
	17	33	32	1422	62	61	2305	654

1. Dikutip dari Browkar : *Memorie Van Overgave Van Der Presdient Van Bali in Lombok October 1932*

Lampiran 4

**Tabel Sekolah yang ada di Bali
sampai dengan tahun 1941¹**

Jenis sekolah	Jumlah sampai dengan tahun 1941		Keterangan
Volk onderwijs	195		Terebar di seluruh Bali
Vorvolg Onderwijs	39	35 vorvolg scholen 3 landvow klasse 3 meisjes klasse	1 meisjes klasse (klas Belanda) di Tabanan
Van Onderwijs	53		
H I S	4	1 di Singaraja 2 di Denpasar 1 di Klungkung	HIS Klungkung berasal dari HIS Siladarma
Amabach school	1		di Denpasar
Onderwijs aan meinjes	2		di Singaraja di Denpasar
Particulier Onderwijs	3		di Jemberana di Singaraja di Tebanan

1. Dikutip dari H.J.J. Moll : *Memorie Van Overgave Van den Afrode Van Resident Bali in Lombo*, Mei 1941, pp. 71-76.

Lampiran 5

**Daftar perusahaan perindustrian di Singaraja
sampai dengan tahun 1955.¹**

Macam usaha	Nama perusahaan	Jenis pemilikan modal	Produksi
Es blok	Buleleng	asing	25 ton
	Banjumas	asing	60 ton
Penggilingan padi	G e n d o	asing	150 ton padi
Pabrik minjak Kelapa	Eng Dju & Co (Temukus)	asing	100 ton Kelapa
Pabrik Kecap	Bo Sing	asing	
Pertenunan	N.V. Bali Darma	pribumi	25 TIB
Penjamakan kulit	Hiap Tjong	asing	
Perusahaan sepatu	N.V. Sedar	pribumi	
	Bali Laksana	pribumi	
	Hiap Tjiong	asing	
	Pan Satia	pribumi	
	I Gst Njoman		
	Betawi	pribumi	
	Toko Lanun	asing	
	Kang Wing	asing	
	Tan Ping	asing	
Tjan Sing	asing		

1. Dikuti dari I Gusti Gde Raka, *Monografi Pulau Bali*. (Djakarta : Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, 1955). pp. 113-119.

	Thiang Njap	asing	
	H. Mustafa	pribumi	
	I Ketut Kawat	pribumi	
	Sederhana	pribumi	
	I Ketut Liarba	pribumi	
Pemborong Bangunan	C.V. Tjandri	pribumi	
	P.P. Hastika	pribumi	
	P.P. I.L.C.	pribumi	
	P.P. Dharma	pribumi	
	P.P. Pribadi	pribumi	
	P.P. Kong Hwe Hien	asing	
	P.P. Perak	pribumi	
Perusahaan tegel/beton	Semeru	asing	
	M u r n i	asing	

Lampiran 6

Macan Usaha	Nama perusahaan	Jenis pemilikan modal	Produksi
Perusahaan mebel	Astagina	pribumi	
	C.V. Tjandi	pribumi	
	Hastika	pribumi	
	Dharma	pribumi	
	Pribadi Perak	pribumi	
Perusahaan Sabun	Siang Song	asing	
	Kho Djin Koei	asing	
	The Joen Loen	asing	
	The Kiem Mien	asing	
	Hiap Tjin	asing	
	Siauw Hik Hwan	asing	
Percetakan	Bali Drukkerij	asing	
	N.V. Pertjetakan Bali	pribumi	
	Pertjetakan Tresna	pribumi	
Perusahaan angkutan laut (veem)	N.V. Lssr (Temukus)	asing	
	N.V. K.P.M. (Pabean)	asing	

Lampiran 7

**STATUTEN
SOERYA KANTA.¹**

- Art. 1. Perkoempoelan ini bernama Soerya Kanta, berdiri di Singaradja boeat lamanja 29 tahoen moelai 1 Nopember 1925.
- Art. 2. Azas perkoempoelan ini :
- a. mengoetamakan boedi,
 - b. memperbaiki economie,
 - c. memperbaiki dan melindoengi nasib kaoem Djaba,
 - d. mengoebah adat jang berlawanan dengan kema-djoean djaman.
- Art. 3. Perkoempoelan mentjapai maksoed-maksoed terse-boet, dengan :
- a. menjiarkan isi kitab² (lontar²) dengan menerbit-kan soerat kabar.
 - b. mengadakan pematjaan (lezingen) dan
 - c. lain-lain oesaha jang tiada melanggar wet negeri.
- Art. 4. Perkoempoelan ini tiada se-kali² mengandoeng politiek.
- Art. 5. Jang boleh menjadi lid perkoempoelan ini bangsa Bali kaoem Djaba, jang beroemoer 18 tahouen ke-atas dan dapat membatja dan menoelis serta jang baik kealkoeannja.
- Art. 6. Barang siapa jang berkehendak mendjadi lid, hen-daklah menerangkan maksoednja itoe kepada Secre-taris Hoffdbestuur.

1. Madjalah Soerya Kanta No. 2, Th. 1, November 1925, hal. 16.

- Art. 7. seorang lid hilang haknja mendjadi lid sebab :
- a. permintaannja sendiri.
 - b. dilepas (royeering).
- Art. 8. Jang koeasa mengadakan hoekoem (wet) perkoempoelan ini Algemeene-Vergadering dari lid-lid. Adapoen jang melakoekan kekoeasaan jaitu Hoofdbestuur.
- Art. 9. Belandja perkoempoelan ini dari tundjangan lid-lid dan derma.
- Art. 10. Barang apa dalam Statuten ini perloe diterangkan, keterangannja itoe dibitjarakan dalam Huishoudelijk-Reglement.
- Art. 11. Statuten dan Huishoudelijk Reglement tiada boleh dioebah, melainkan denan moefakatnja soera lid jang terbanjak, dalam Algemeene-Vergadering.

Hoffdbesturr Soerya – Kanta :

Menoeroet pilihan oprichtingsvergadering 1 Nopember 1925 :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. President | : Ktoet Sandi. |
| 2. Vice-president | : Ketoet Nasa. |
| 3. 1e Secretaris | : Nengah Metra. |
| 4. 2e Secretaris | : Ketoet Kaler. |
| 5. Penningmeester | : Ketoet Poerna. |
| 6. Commissarissen | : 1. Ketoet Moedasara.
2. Wajah Roema. |

Lampiran 8

**HUISHOUDELIJK – REGLEMENT
" SURYA KANTA "**¹

Algemeene Bepaling :

- Art. 1. Perhiempoenan "S.K." tiada sekali-kali akan toeroet:
- a. membitjarakan keadaan pemerintahan (politeiek),
 - b. tjampor atau memberi pertimbangan kepada perkoempoelan-perkoempolean politiek jang soedah ada atau jang akan didirikan.

Leden :

- Art. 2. Perkoempolean ini terdiri atas lid-lid biasa, donateurs, dan lid-lid kehormatan (eere leden).
- Art. 3. Segala leden perhiempoenan haroes memperhatikan dan mendjalani barang apa jang terseboet dalam Statuten dan Huishoudelijk Reglement.
- Art. 4. Barang siapa maoe mendjadi lid, haroeslah menerangkan maksoednja itoe dengan soerat kepada Secretaris-Afdeeling dimana ia maoe toeroet, dengan menjeboetkan oemoernja, djabatannja dan adressnja.
- Art. 5. Seorang berenti mendjadi lid, sebab :
- a. mati,
 - b. permintaan sendiri,
 - c. dilepas oleh Hoofd-bestuur, sebab koerang baik kelakoeannja, memboesoekkan nama perhimpoean dan melanggar art. 3.

1. *Suraya kanta*, (no. 8, Th. II, Agustus 1926), pp. 114–117.

Lid-biasa :

- Art. 6. Jang boleh mandjadi lid biasa jaitoe orang Bali kaoem
 Jaba, jang beroemoer 18 tahoen keatas, jang dapat membatja dan menoelis.
- Art. 7. Dia haroes berdjandji akan menjokong perkoempoelan dengan se-koeatnja, atau dengan tenanga, baik-poen dengan fikiran, dan djika perloe djoega dengan orang.
- Art. 8. Lid-lid bias poenja hak stemmen dan memilih atau dipilih. Dia membajar contributie tiap2 boelan banjaknja 40 sen (ditetapkan oleh Algemeene Vergadering).

Donateurs dan Eere—leden :

- Art. 9. Jang boleh mendjadi donateur jaitoe segala bangsa jang sanggoep menjokong perkoempoelan dengan oeang, sedikit-dikitnja membajar sekali 25 roepiah, atau tiap2 boelan F. 1,—.
- Art. 10. Barang siapa jang njata djasanja kepada perkoempoelan ini, Algemeene Vergadering ada hak mengangkat dia djadi eerelid (lid kehormatan).
- Art. 11. Donateur dan eere-laden didalam vergadering hanja boleh mengeloearkan boeah pikirannja sebagai pertimbangan sahadja (advies).

Hoofd—Bestuur :

- Art. 12. Perhimpoean ini dipimpin oleh satoe Hoofd-bestuur, jang terjadi dari pada sedikitnja 7 orang jaitoe:
 1. President, 1 vice President, leerste Secretaris, 1 Tweede Secretaris, 1 Penningmeester dan 2 Commissarissen.

- Art. 13. Hoofd-bestuur dipilih oleh Alg. Verg. oentoe seteahoen lamanja. Lid-lid Hoofd-Bestuur lama, jang meletakkan pekerdjaannja itoe, boleh dipilih poela. (lihat Art. 23).
- Art. 14. Sebeloemnja Alg. Verg. diadakan, maka ada salah satoe lid-bestuur jang berenti disebabkan sesoeatoe hal, maka Hoofd-Bestuur boleh menggantikannja. Hal ini nanti ditetapkan oleh Alg. Verg. jang akan datang (lihat Art. 23 sampai 27).
- Art. 15. Hoofd-Bestuur haroes mendjalankan hoekoem² (wet) dan kepoetoesan² Alg. Verg. dan djoega mendjadi wakilnja perkoempoelan, baik didalam ataupun diloeuar pengadilan.

President :

- Art. 16. Dalam Hoofd-Bestuur Presidentlah jang berkoeasa. Segala soerat² ideran, pemberian tahoe, dan soerat² lainnja, haroes dikirim dengan setahoenja dia. Soerat² jang perloe haroeslah ditanda tangani oleh President dan Secretaris. Dia haroes memboeka, mendjalankan dan menoetoep vergadering. President haroes menandatangani notulen, jang disetodoei oleh vergadering, ber-sama² dengan Secretaris.

Vice-President :

- Art. 17. Soeart² jang diterima dari Secretaris haroes diboeboehi pertimbangannja. Sesoadahnja haroes dikirimkan kepada President. Dia haroes membantoe President, dan waktoe President tidak ada, ialah jang mengganti.

Eerste Secretaris :

- Art. 18. Eerste Secretaris memegang archief dan melakoekan semoea pekerdjaan toelis-menoelis. Dia haroes mem-

boeka soerat2 jang diterima, dan haroes memberikan soerat itoe kepada Vice President, sesoedahnja diboeboehi pertimbangannja. Dia haroes memboeat verslag (notulen) dari vergadering2. Tiap2 tahoen dia haroes memboeat Jaarverslag.

Tweede Secretaris :

Art. 19. Tweede Secretaris haroes memegang inventaris dan ledenlijst dan menolongi Eerste Secretaris dalam pekerdjaannja.

Penningmeester :

Art. 20. Penningmeester haroes memegang keloear dan ma-soeknja wang (kasboek) sebagai : menerima contributie, derma dan lain2nja dan membelandjakan Perkoempoelan. Tiap2 Alg. Verg. dia haroes memboeat verslag oeng dari dalam tahoen jang laloe.

Commissarissen :

Art. 21. Kedoea commissarissen itoe selaloe menjelidiki keadaan perkoempoelan dan mengeroes perkara2 jang tidak sjah. Senantiasia ia boleh periksa kasboek, inventaris dan archief.

Dagelijkch Bestuur :

Art. 22. Dagelijksch Bestuur itoe terdjadi oleh President, Eerste Secretaris, dan Penningmeester.

Vergaderingen :

Art. 23. Tiap2 tahoen diadakan Openbare-Algemeene-Vergadering (congres), jaitoe pada waktoe liberoeran poeasa. Alg. Verg. loear biasa boleh diadakan kalau Hoofd Bestuur memandang perloe dan patoet.

- Art. 24. Seminggoe sebeloemnja Alg. Verg. diadakan, agenda haroes telah tersiar. Agenda itoe haroes ditetapkan pada Bestuur-Vergadering. Sesoeatoe hal jang tidak ada dalam agenda, tidak boleh dibitjarakan, ketjoeali dengan izinnja Algemeene Vergadering.
- Art. 25. Hanja Algemeene Vergadering ada hak memboeat wet-wet (hoekoem) boeat perkoempoelan.
- Art. 26. Bestuurvergadering boleh diadakan pada sebarang waktoe, apabila perloe. 7 hari sebeloemnja vergadering lid2 bestuur haroes soedah diperingatkan oleh secretaris.

Stemmen :

- Art. 27. Akan mengambil kepoetoesan dalam vergaering, haroeslah menoeroet stem jang terbanjak (lebih dari 1/2). Stem2 blanco ditoeroetkan kepada stem jang terbanjak. Voorstel akan merobah Statuten haroeslah ditoendjang dengan sedikitnja $\frac{3}{4}$ dari pada soeara Alg. Vergadering.
 Kalau stemmen itoe stakking (jang soetoedjoe sama banjaknja dengan jang anti) haroes distem lagi. Kalau stakking 2 kali, haroeslah dipoetoeskan :
- a. kalau memilih orang dengan oendi (lot).
 - b. kalau memilih barang dengan President (Voorzitter).
- Art. 28. Stemmen itoe, apabila hendak memilih orang, haroeslah memakai soerat. Djika barang dengan soeara sadja.

Oeang :

- Art. 29. Oeang perkoempoelan itoe dapat dari :
- a. contributie leden.
 - b. derma2 dan toendjangan dari orang2 (donateurs) atau perkoempoelan2 lainnja.

c. pendapatan dari lain2nja jang tiada bertentangan dengan wet negeri (sebagai : pasar derma, voetbal dan lain2nja).

Art. 30. Segala hasil2 jang diperoleh dipergoenakan oentoeck Perkoempoelan.

Orgaan dan Redactienja :

Art. 31. Perkoempoelan ini menerbitkan satoe orgaan jang djoega "Soerya Kanta" namanja, jang didjaga dan di-amat2i oelh satoe Commisie van Redactie, jang diangkat dan dilepas oleh Hoofd Bestuur. Jang boleh mendjadi lid Redactie, jaitoe hanja seorang lid biasa.

Art. 32. Orgaan itoe terbit pada tiap2 boelan. Karangan2 boleh senantiasa dikirimkan kepada redactie.

Art. 33. Karangan2 jang mengandoeng antjaman atau kritiek kepada perkoempoelan atau Bestuur haroeslah dikirimkan kepada Hoofd-Bestuur.

Art. 34. Lid2 biasa, donateur dan eere leden mendapat orgaan graties (dengan pertjoema).

Art. 35. Administratienja Orgaan itoe didjalankan oleh Hoof-Bestuur sendiri.

Lezingen :

Art. 36. Tempo2 diadakan pembatjaan (lezingen) perkara economie, Cultuur dan lain2nja, dihadapan orang banjak.

Controle :

Art. 37. Tiap2 tahoen Alg. Vergadering mengadakan 5 orang oentoeck memeriksa keadaan oeang kas perkoempoelan (Verificatie).

Afdeelingen :

- Art. 38. Djika pada satoe tempat ada se-koerang2nja 10 leden dari perkoempoelan, maka disitoe bolehlah diadakan satoe afdelling. Afdeeling itoe dipimpin oleh satoe Bestuur, jang terdiri dari pada sedikitnja 5 orang jaitoe : 1 Voorzitter, 1 Secretaris, 1 Penningmeester dan 1 Commissaris.
- Art. 39. Afdeeling itoe boleh mengatoer djalannja dengan satoe Reglement sendiri asal dengan bertentangan dengan Algemeene Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglementnja Afdeeling boleh dipakai, sesoedahnja disetudjoei oelh Hoofdbestuur.
- Art. 40. Afdeelingbestuur tiada boleh melebihi atau mengurangi memoengoet contributie dari pada jang telah ditentoean oleh Alg. Vergadering (congres). 75 % dari pada pendapatan contributie haroes dikirimkan kepada Hoof Destuur (Algemene-kas).
- Art. 41. Satoe boelan sebelomnja Alg. Vergadering (Congres) tiap2 afdeeling haroes mengirim satoe Jaarverslag kepada Hoofd-Bestuur, beserta voorstel2 jang maoe akan dikemoekakan didalam congres.
- Art. 42. Tiap2 boelan Secretaris Afdeeling haroes berkirin soerat kepada hoofd-Bestuur, menerangkan keadaan Afdeeling dan banjaknja leden (tambah atau koerangnja).

Slotbepaling :

- Art. 43. Segala hal2 jang tiada diatoer didalam statuten dan Huishoudelijk Reglement ini, dipoetoeskan oleh Hoofd-Bestuur.

Disjahkan dalam Openbare Algemeene Vergadering "S.K." pada tanggal 21 Maret 1926.

Lampiran. 9.

**JUMLAH PENDUDUK GOLONGAN TRIWANGSA DAN JABA
DI BALI DAN LOMBOK
(Sensus Penduduk pada bulan Nopember 1920)**

Daerah	Jumlah Golongan HIndu-Bali	Golongan Tri Wangsa				
		Brahmana	Ksatrya	Wesia	Total	Persentase
1. Buleleng	133.000	1.600	2.300	4.000	7.900	6
2. Jembrana	28.000	100	60	300	460	1,6
3. Karangasem	164.000	1.300	3.000	3.400	7.700	4,7
4. Gianyar	141.000	750	6.500	1.250	8.500	6
5. Badung	170.000	3.000	4.300	6.100	13.400	8
6. Tabanan	148.000	1.700	3.100	5.900	10.700	7,2
7. Klungkung termasuk Bangli	133.000	1.400	6.000	2.500	9.000	7,5
Pulau Bali	917.000	9.850	25.260	23.450	58.560	6,4
Pulau Lombok	29.000	2.300	250	3.700	6.500	21,5

Dikutip dari : C. Lekkerkerker, "De kastenmaatschappij" in Britisch Indie en op Bali". *Mensch en Maatschappij : Driemaandelijksch Tijdschrief.* (P. Noordhoff Broningen, overdruk 1 Juli 1926), no. 3, p. 4.

Lampiran 10.

KEADAAN SEKOLAH-SEKOLAH DI BALI
1 OKTOBER 1926 - 1 JUNI 1929

Onderafdeling	Aantal der scholen op		Aantal der op						Toelichtingen
	1 Oct 1926	1 Juni 1929	1 October 1926 - 1 Juni 1929						
			Onder- wij- zer	Leerlingen		Onder- wij- zer	Leerlingen		
			j	m		j	m		
Buleleng	Europeesche Lagere School								
	1	1	2	23	16	2	31	14	
Buleleng	Holl. Inlandsche School.								
	1	1	7	127	15	7	174	25	
West-Lombok	1	1	6	133	27	8	161	36	
Badoeng	1	1	7	201	24	9	158	36	
Kloengkoeng	—	1	—	—	—	3	100	9	geopend op 1 Ju- li 1928
Buleleng	2e Klasse Scholen.								
	8	8	28	758	28	31	1265	109	
	2	2	9	243	15	9	337	37	
	3	3	11	398	19	14	579	59	
	5	5	17	565	28	17	714	53	
	1	1	4	138	18	4	191	13	
	3	5	12	355	29	17	727	122	Vervolgschool te Blahkoeh opge- richt op 14 Mei 1928
Tabanan	5	6	20	577	40	21	839	106	1 2e kl. school te Denpasar op- gericht op 13 April 1928.
Gianjar	2	3	9	326	16	11	402	44	1 2e kl. school te Tegallinah opgericht op 22 April 1927. 1 vervolgschool te Oeboed opge- richt op 4 April 1928

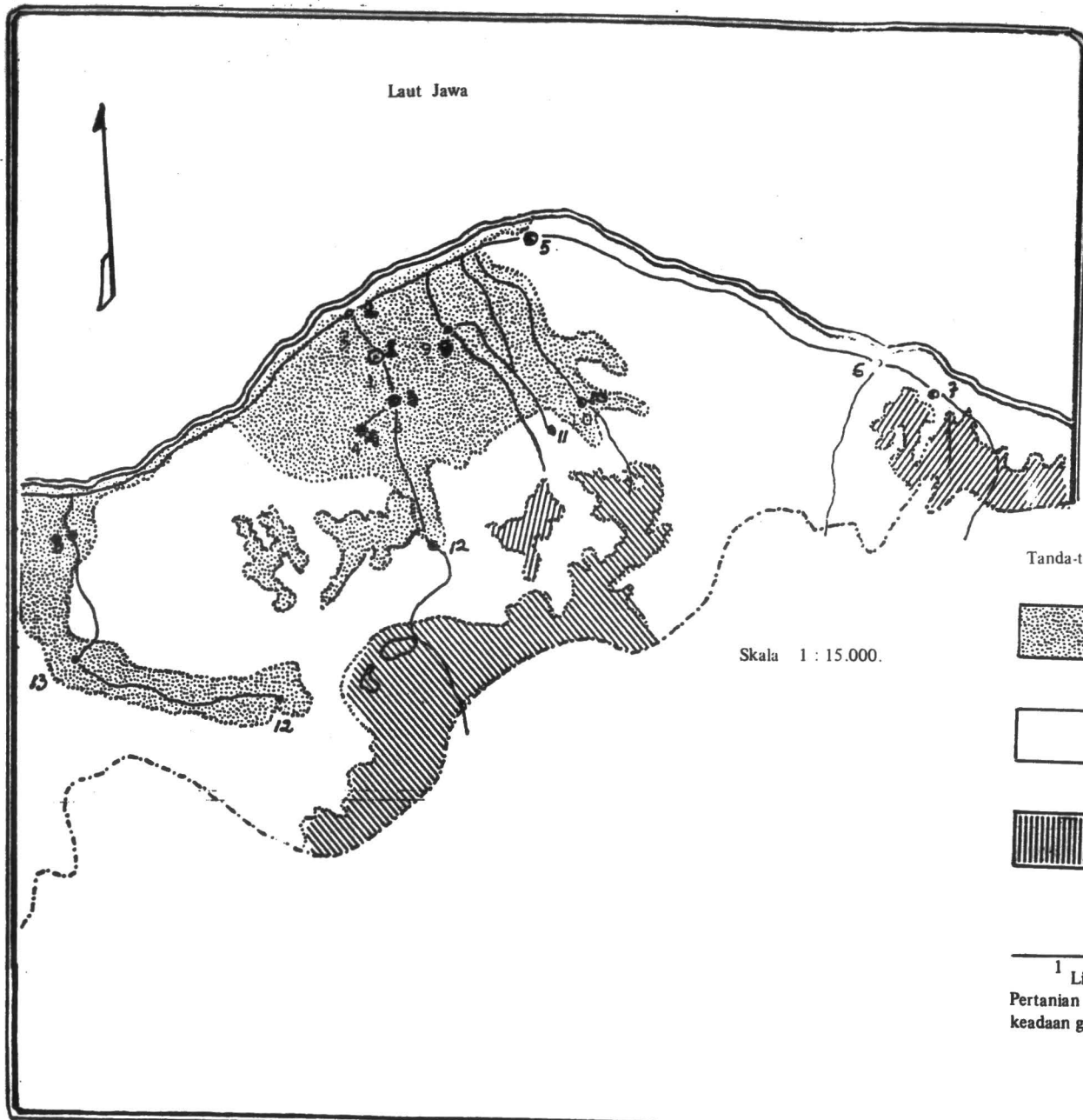
Kloengkoeng	3	2	13	419	20	14	526	92	1 volkschool te Pandji opgericht op 18 Januari 1928. Een nieuwe volkschool wed 11 Juli 1929 geopend te Sidatapa (Bandjar) met 37 jongens leerlingen.
Karangasem	2	2	7	1029	41	33	1479	67	
Djembrana	—	3	—	—	—	6	279	9	1 volkschool te Jeh Embang opgericht op 15 Maart 1927 I. I. idem te Poeloe-kan opgericht op 9 Juli 1927. I. idem te Ba-loek opgericht op 1 Augustus 1928
Cost-Lombok	13	24	17	729	21	32	1579	86	I id. te Montongbetok opgericht op 12 Mei 1928. I id. te Andjani opgericht op 7 Juni 1928. I id. te Dasanlekong op 2 Augustus 1928. I id. te Kalidjaga op 30 Mei 1928. I id. te Mamben op 12 September 1928. I id. te Pringgase-la op 25 Augustus 1928. I id. te Roemboek op 21 Juni 1927.

West-Lombok	6	15	7	359	3	18	820	4	<p>I id. te Lepak op 20 Juni 1927. I id. te Apisik op 17 Mei 1928. I id. te Korleko op 25 Augustus 1928. I id. te Pram-poean opgericht op 28 Mei 1927. I id. te Lingsar id. op 2 April 1928. I id. te Dasange-ria id. op 8 Mei 1928. I id. te Doeman id. op 15 No- vember 1928. I id. te Godang id. op 25 Mei 1927. I id. te Koeri-pan id. op 30 Juni 1927. I id. te Reomak id. op. 30 Juli 1928. I id. te Goe- noeng Malang. id op 16 Augustus 1928. I id. te Pagesang- an id. op 7 De- sember 1928. I id. te Darek id. op 3 Juli 1928. I id. te Penoe- djak id. op 28 Juli 1928. I id. te Darma- dji id. op 30 Oct. 1928 I id. te Sintoeng id. op 5 November 1928.</p>
Midden-Lombok	6	10	8	341	25	12	615	38	

Badoeng	20	22	36	1365	74	42	1854	252	2 volksscholen opgericht resp. te Plaga en Serangan op 1 en 18 October 1928
Tabanan	20	22	38	1732	70	47	1995	235	2 id. te Pedjatan en Batoeriti id. resp. op 31 Januari 1928 en 1 Juni 1928.
Gianjar	9	12	14	718	26	24	941	132	3 volksscholen te Tampaksiring Keramas en Mas opgericht reps op 26 Juli 1928 3 Juli 1928 en 1 Augustus 1928
Kloengkoeng	6	23	11	522	24	39	1743	195	1 Volksschool te Djoengoetbatoe opgericht 1 November 1926. 1 id. te Kintamani id. op 1 Mei 1927. 1 id. te Aan id. op 1 Juli 1927. 4 volksscholen te Sowana, Pasinggahan, Gelgel en Tjatoer opgericht op 5 Maart 1928. 1 id. te Batoe madeg id. op 7 Maart 1928. 1 id. te Tanglad id. op 22 Maart 1928. id. te Penindjogan id. Op 23 April 1928 1 id. te Kamasan id. op 18 Februari 1929.

Karangasem	10	11	13	743	76	17	1019	64	1 Volksschool te Njalian opgericht op 1 April 1929. 3 id. te Bangli Koeboe en Kajoebihi id. op 4 April 1929. 1 id. te Apoean id. op 5 April 1929. 1 id. te Selat id. op 7 Mei 1929. 1 id. te Karangasem id. op 1 Mei 1929.
------------	----	----	----	-----	----	----	------	----	--


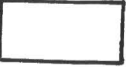

Dikutip dari : L.J.J. Caron, *Memorie van overgave van den Resident van Bali en Lombok*. (Augustus 1929), pp. 94-97.



PETA KECAMATAN BULELENG.¹
 (dan daerah Sekitarnya).

1. Singaraja.
2. Pabean Buleleng.
3. Sukasada.
4. Panji.
5. Kubutambahan.
6. Bondalem.
7. Tejakula.
8. Banjar.
9. Jinengdalem.
10. Sawan.
11. Sudaji.
12. Mayong.
13. Munduk.

Tanda-tanda dalam gambar :

-  Sawah
-  Tegalan
-  Boschreserve.

Skala 1 : 15.000.

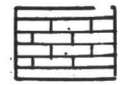
¹ Lihat I Goesti Gde Raka : *Monografi Pulau Bali*. (Djakarta : Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, 1955), PP. 28-29. Peta bermaksud memperlihatkan perbandingan keadaan geografi kota Singaraja dengan daerah sekitarnya.

PETA KOTA SINGARAJA (inzert).¹

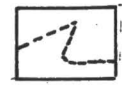
Keterangan gambar :



Tukad Buleleng.



Sawah.



Batas wilayah yang dihuni.



Kuburan umat Hindu. i n d u .

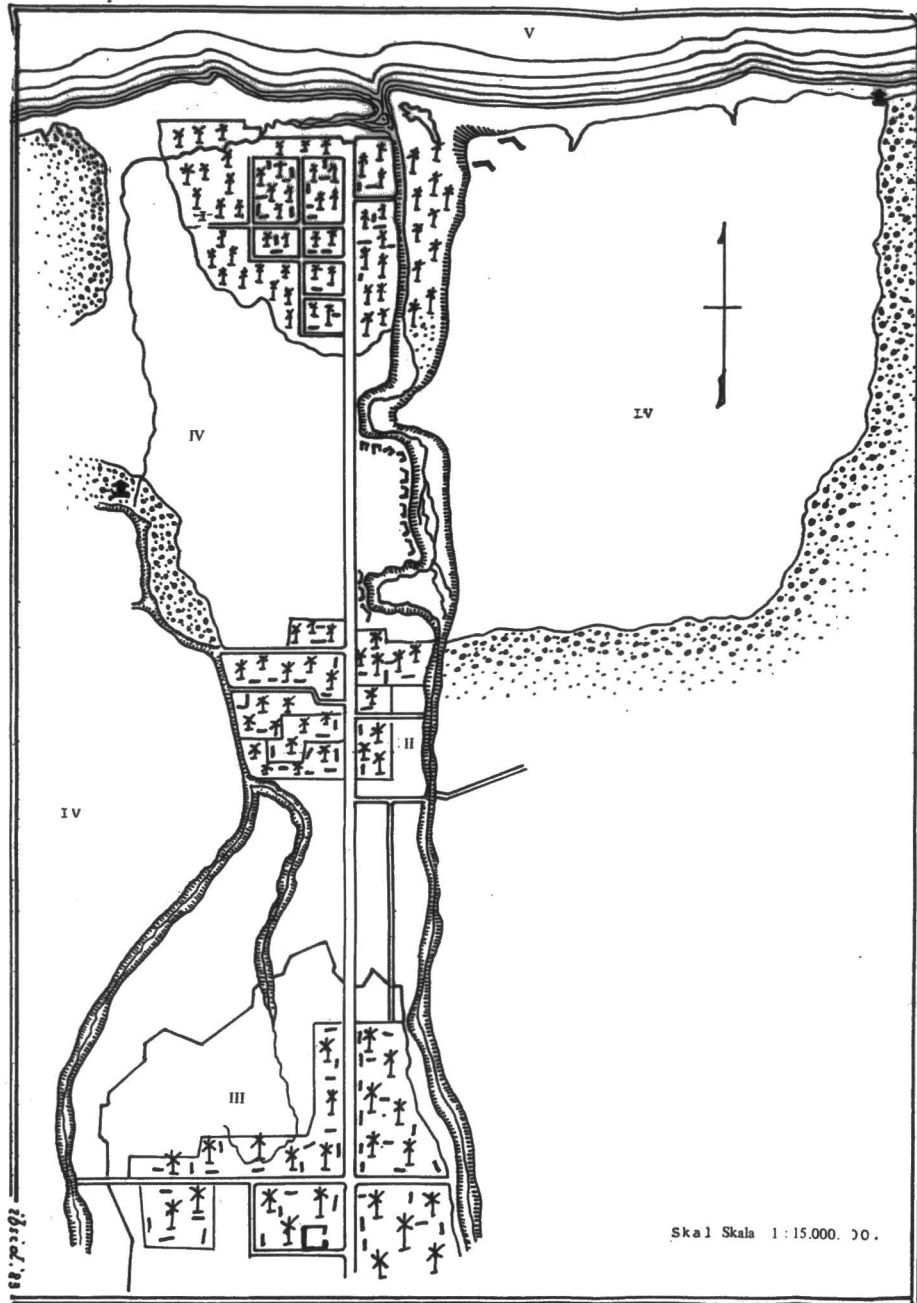
1. Banjar Tegal.
2. Kantor Gubernur Sunda Kecil.
3. Sekolah Rakyat No. 1.
(yang pertama di Bali).
4. Penjara.
5. Gedong Kirtya.
6. Istana.
7. Pasar.
8. Banjar Delod Peken.
9. Banjar Penataran.
10. Banjar Petak.
11. Banjar Tengah.

¹ Diproyeksikan dari Peta Kota Singaraja milik Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, tahun 1962. disesuaikan dengan keadaan tahun 1956.

Skala 1 : 5.000. 10.

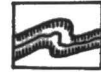


163123



PETA KOTA SINGARAJA DAN PABEAN BULELENG¹

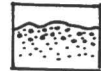
Keterangan gambar :



Sungai



Perkumpulan dengan
kebun kelapa. engan
kebun kelapa.



Boschrand (hutan terbakar = bekas hutan
bambu berduri).



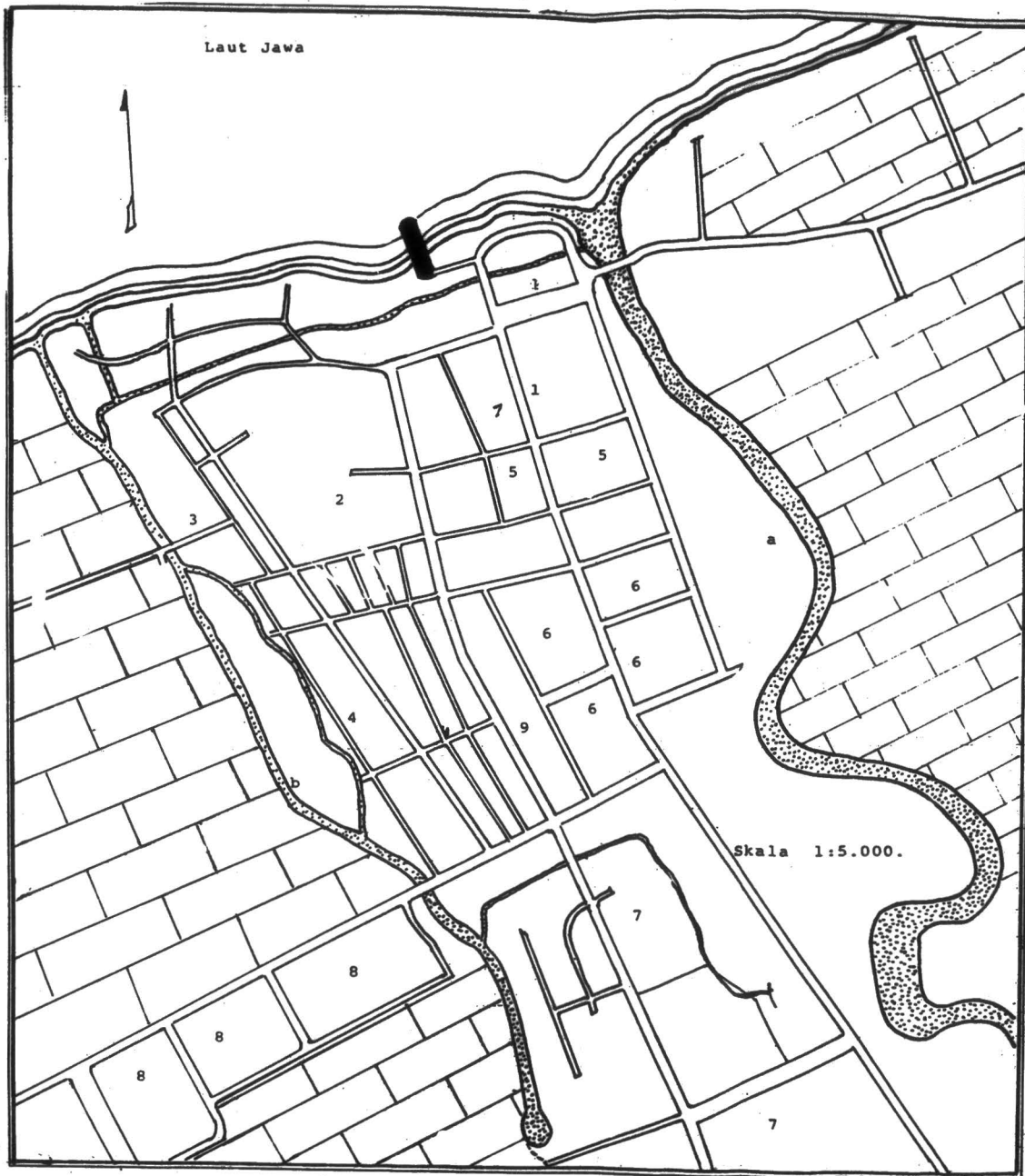
Pura.

I. Pabean Buleleng

- I. Pabean Buleleng
- II. Banjar Jawa
- III. Singaraja
- IV. Sawah
- V. Laut Sunda (Laut Jawa).

¹Sebagai referensi lihat J.W.F. Herfkens : *Oost-Indische Krijgeschiedenis*. (Tt : Militaire Academie, 1902), lampiran 1. Peta petunjuk militer ini dibuat pada tahun 1849.

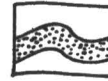
Ska1 Skala 1 : 15.000. 00.



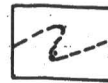
PETA PABEAN BULELENG.¹
(insert).

Keterangan gambar.

Sungai :
a. Tukad Buleleng,
b. Tukad Mumbul.



Sawah



Batas wilayah yang dihuni.



Dermaga.

1. Kampung Cina (Peciinan).
2. Kampung Sasak.
3. Kampung Bugis.
4. Kampung Anyar.
5. Kampung Kajanan.
6. Banjar Bali.
7. Banjar Jawa.
8. Banjar Kaliuntu.
9. Pasai.

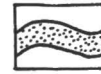
¹ Diproyeksikan kembali dari Peta Kota Singaraja milik Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, tahun 1962. Disesuaikan dengan keadaan tahun 1956.

Laut Jawa

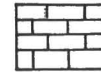


PETA KOTA SINGARAJA DAN PABEAN BULELENG. 1

Keterangan gambar.



Sungai :
a. Tukad Buleleng.
b. Tukad Banyumala.



Sawah



Kuburan :
1. Kuburan Hindu.
2. Kuburan Islam.
3. Kuburan Cina



Batas wilayah yang di-
huni.

- I. Pabean Buleleng dengan dermaganya.
- II. Singaraja.

1 Peta ini merupakan peta petunjuk untuk memperlihatkan perkembangan wilayah geografis. Lihat peta kota Singaraja milik Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, tahun 1962.

Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, tahun 1962.

Skala 1 : 10.000. 0.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Gama : Oud Balisch Wetboek*, op last van den Resident van Bali en Lombok in het hoog-balisch vertaald. door Goesti Poetoe Djilantik en Ida Bagoes Oka, Batavia, Landsdrukkerij, 1909.
- Agama : Oud Balisch Wetboek*, op last van den Resident van Bali en Lombok in het hoog-balisch vertaald, door Goesti Poetoe Djilantik en Ida Bagoes Oka. Batavia: Landsdrukkerij, 1909
- Bali Adujana*, no. 9 Augustus 1929
- Bertling, C.Tj. *Pendeta Tanah Indonesia*, Jakarta : Brathara, 1974.
- Bhawanegara*, no. 8, Januari 1935, no. 9, Februari 1932, no. 11, April 1932.
- Caron, L.J.J. *Memorie van Overgave van den Resident van Bali Lombok*. Augustus, 1929
- Daftar Perkembangan Sekolah Dasar di Daerah Bali dari tahun ke tahun*. 1977.
- Djatajoe*, no. 1, Augustus 1941
- Dumont, Louis. *Homo Hierarchicus : The Caste System and its Implication*. London : Paladin, 1972.
- Geertz, Hindred and Clifford Ceertz, *Prinship in Bali*. Chicago : The University of Chicago Press, 1975.

- Grader, C.J. *Nota van toelichtingen betreffende het in the stelen Zelfbesturend Landschap Boeileng*. (Tanpa tahun).
- Hobsbawn, E.J. "From Social History to the History of Society." *Daedalus : Historical Studies Today*. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Winter 1971, hal. 20-45.
- Kops, G.F. de Bruyn, *Nota van Overgave van het Bestuur over de Residentie Bali en Lombok*. 1909.
- Korn, V.E. *Het Adatracht van Bali*. 'S-Gravenhage: C. Naeff, 1932.
- Kuntowijoyo, *Beberapa Model Penulisan Sejarah Lokal*. (Bro-sur). Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984.
- Lekkerkerker, C. *Bali en Lombok: Oversziecht der literatuur omtrent deze eilanden tot einde 1919*.
- , "Het Voorspel der vestiging van den Nederlandsche macht op Bali en Lombok". *B.K.I.*, 29, 1923.
- Lieferinck, F.A. *Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten*. 's-Gravehgge : Martinus Nijhoff, 1921.
- Moll, H.J. *Memorie van Overgave van den Aftreddend Resident van Bali en Lombok*. 24 Mei 1941.
- Mollenburg, P.E. *Memorie van Overgave van het Gewest Bali en Lombok*, September 1926.
- Murdock, G.P. *Social Structure*. New York: The Free Press, 1965.
- Nielsen, A.K. *Leven en avonturen van een oostinjevaarder op Bali*. Amsterdam : 1928.
- Pendit, Njoman S, *Bali Berdjuang*. Denpasar: Jajasan Kebaktian Pedjuang Daerah Bali, 1954.
- Peringatan 1 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali*. 1951. Raka, I Gusti Gde, *Monografi Pulau Bali*. Djakarta: Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, 1955.
- Sarasamuccaya*, Terdjemahan Nojman Kadjeng (es). Direktorat Djendral Bimbingan Masjarakat Hindu dan Budha De-

- partemen Agama Republik Indonesia, 1970/1971.
- Stenis, L.U van. *Memorie van Overgave van het Gewest Bali en Lombok*. April 1919.
- Suryakanta*, no. 8, Agustus 1926; no. 2, November 1925; no. 4, April 1926.
- Utrecht, E. *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Sumur Bandung, 1962.
- Vollenhoven, C. van. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*. Leiden, 1933.
- Widipapincatan*. (manuskrip).
- Wolf, Eric R. Kinship, "Firendship and Patron-Client Relation in Complex Societies". dalam Michael Baton, (ed), *The Social Antropology of Complex Societies*. London : Tovistock Publication, 1973.

